

BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

2.1. KONDISI DAN ANALISIS

2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam 10 tahun terakhir terus mengalami perubahan. Tingginya frekwensi bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor telah banyak mengubah kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup di kabupaten ini. Selain oleh alam, perubahan kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup juga turut dipicu oleh pemanfaatan sumber daya tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi yang telah menyebabkan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Kondisi ini antara lain terlihat dari terus berkurangnya luas areal hutan dan bertambahnya luas lahan kritis serta berbagai kerusakan pada ekosistem pesisir dan laut. Sebagai salah satu contoh, pada tahun 90-an kawasan hutan lindung Sahandaruman tercatat seluas + 800 ha, namun menurut hasil pengukuran terakhir pada tahun 2003, luas hutan lindung ini tinggal + 550 ha. Degradasi lingkungan serius juga terjadi di kawasan pesisir akibat penambangan karang/pasir, penebangan hutan mangrove dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang mengakibatkan +35% ekosistem terumbu karang dan +20% hutan mangrove mengalami kerusakan. Kerusakan ekosistem-ekosistem ini juga telah turut memicu abrasi dengan tingkat kerusakan cukup tinggi di berbagai kawasan pesisir.

Berbagai upaya untuk menekan laju kerusakan lingkungan telah ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Beberapa program strategis adalah: (i) rehabilitasi kawasan hutan Sahandaruman (kerjasama dengan Yayasan Bird Life), (ii) pengelolaan dan pelestarian terumbu karang melalui kegiatan *Coral Rehabilitation and Management Project* (tahun 1999/2000), (iii) konservasi sumber daya (Instruksi Bupati Nomor 1 tahun 2003 tentang Pelarangan Penggunaan dan alat berbahaya dalam kegiatan pemanfaatan SDA Perikanan dan Kelautan), (iv) penanaman mangrove di beberapa wilayah rawan abrasi tahun 2003 dan pembangunan talud pengaman pantai, (v) peninjauan ulang terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan (vi) pencegahan bencana lewat penertiban/sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana terutama di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan di sejumlah daerah berbukit dengan kemiringan curam serta pesisir pantai. Akan tetapi, sejauh ini upaya-upaya ini belum cukup efektif untuk menekan laju kerusakan lingkungan dan mengurangi dampak bencana alam sehingga berbagai terobosan masih sangat diperlukan dalam pembangunan 20 tahun ke depan.

Proyeksi Peluang.

Isu Lingkungan Global. Tumbuhnya kesadaran global tentang kondisi lingkungan yang semakin memburuk telah memaksa seluruh negara mengubah paradigma pembangunan dari pendekatan pembangunan ekonomi konvensional menjadi ekonomi ekologis. Tercatat sekitar 154 perjanjian internasional dan kesepakatan multilateral terkait secara langsung maupun tidak dengan isu lingkungan global dan Indonesia telah menandatangani 14 perjanjian di antaranya.

Pengembangan Sistem Mitigasi Bencana. Pengembangan sistem mitigasi

bencana alam melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketersediaan peta rawan bencana geologi yang baik dan tata ruang yang memperhitungkan kawasan rawan bencana geologi secara cermat diperkirakan berpotensi mengurangi dampak bencana.

Proyeksi Ancaman

Kawasan Kepulauan Sangihe merupakan gugusan pulau-pulau yang terletak pada rangkaian alur gunung api dan hampir di seluruh wilayah struktur tanahnya labil. Frekwensi gempa bumi dan curah hujan yang relatif tinggi, angin puting beliung serta gelombang pasang yang pada Musim Angin Barat, Utara dan Selatan mengakibatkan setiap saat bisa terjadi bahaya banjir, erosi, tanah longsor, yang dapat mengancam keselamatan masyarakat serta merusak fasilitas umum. Kawasan ini juga berada pada peta rawan Tsunami.

Ancaman terhadap kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut umumnya terkait dengan masalah kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di wilayah pesisir. Banyak hasil kajian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan pesisir dan laut seperti perambahan pada kawasan hutan mangrove dan kerusakan terumbu karang sebagai akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan semuanya bertalian erat dengan kondisi kehidupan masyarakat pesisir.

Proyeksi Permasalahan

Ada berbagai permasalahan yang muncul dan memicu kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe. Beberapa dari masalah itu adalah:

Karakteristik Wilayah. Fenomena alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, gelombang pasang, angin puting beliung, banjir yang mengakibatkan longsor, abrasi dan erosi merupakan masalah serius yang semakin mempersulit keadaan karena hampir setiap tahun, daerah ini dilanda bencana alam yang memporak-porandakan permukiman penduduk, lahan pertanian serta merusak berbagai fasilitas umum, mengancam keselamatan pelayaran yang pada akhirnya bermuara kepada kerugian material dan korban jiwa. Berbagai keluhan dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan tingkat kesulitan manajemen pemerintahan mengingat Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki empat karakteristik utama yang secara signifikan mempengaruhi perumusan dan implementasi berbagai kebijakan percepatan pembangunan yaitu sebagai Daerah Perbatasan, Daerah Kepulauan, Daerah Rawan Bencana dan Daerah Tertinggal dan Miskin.

Daerah Perbatasan

Karena letak geografis Kepulauan Sangihe berada pada bagian paling Utara Nusantara dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Philipina dan Lautan Pasifik, fakta membuktikan bahwa hingga kini Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah perbatasan masih menyandang predikat daerah tertinggal, terpencil serta benuansa kumuh karena tidak terurus sehingga belum mampu menampilkan sisi luar NKRI yang kompetitif bagi pandangan Negara tetangga. Kondisi yang kurang menguntungkan ini berimplikasi negatif antara lain yang paling mengedepan adalah "isu wilayah transit teroris, aktivitas penyelundupan/perdagangan barang terlarang, uang palsu dan kegiatan-kegiatan ilegal lainnya", termasuk eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan secara tidak terkendali (merugikan devisa negara) yang dilakukan oleh oknum nelayan asing yang tidak berhak.

Daerah Kepulauan

Terdiri dari 112 buah pulau, dengan rincian 30 buah berpenghuni dan 82 buah belum berpenghuni, yang letaknya menyebar dengan jarak relatif berjauhan di mana secara praktis membentuk enam klaster kepulauan: (1) Klaster Pulau-pulau Perbatasan, (2) Klaster Sangihe, (3) Klaster Pulau Kahakitang, (4) Klaster Siau, (5) Klaster Tagulandang dan (6) Klaster Biaro. Keenam Klaster kepulauan ini belum mampu bersinergi dalam kaitan penciptaan hubungan fungsional di berbagai bidang strategis.

Daerah Rawan Bencana Alam

Kawasan Kepulauan Sangihe merupakan gugusan pulau-pulau yang terletak pada rangkaian alur gunung api dan hampir di seluruh wilayah struktur tanahnya labil. Frekuensi gempa bumi dan curah hujan yang relatif tinggi, angin puting beliung serta gelombang pasang yang pada Musim Angin Barat, Utara dan Selatan mengakibatkan setiap saat bisa terjadi bahaya banjir, erosi, tanah longsor, yang dapat mengancam keselamatan masyarakat serta merusak fasilitas umum. Kawasan ini juga berada pada peta rawan Tsunami.

Daerah Tertinggal dan Miskin

Karakteristik Kepulauan Sangihe sebagai Daerah Perbatasan, Daerah Kepulauan dan Daerah Bencana Alam ditambah dengan kondisi prasarana dan sarana transportasi, telekomunikasi, lembaga perekonomian serta fasilitas pelayanan masyarakat yang sangat tidak memadai, mengakibatkan

rendahnya peluang-peluang produksi yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Kecuali itu, masyarakat Daerah ini selalu terjebak dengan tingginya biaya hidup (*high cost economy*), karena faktor geografi dan lemahnya aksesibilitas di berbagai aspek kehidupan.

Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut terus meningkat. Kerusakan

ekosistem umumnya dipicu oleh penebangan hutan mangrove, kerusakan terumbu karang dan padang lamun yang telah menyebabkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Kondisi ini semakin diperparah oleh praktek-praktek penangkapan ikan destruktif dan ilegal, penambangan batu karang serta perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah kurang tepat.

Penegakan Hukum yang Belum Efektif. Luasnya cakupan wilayah

pengelolaan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan pengentasan permasalahan penangkapan ikan yang merusak dan ilegal tidak efektif.

Belum Diterapkannya Sistem Mitigasi Bencana. Kabupaten Kepulauan

Sangihe sangat rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor dan tsunami karena terletak pada lintas gunung berapi dan didominasi oleh wilayah dengan kemiringan di atas 40%. Salah satu gunung berapi di wilayah ini, Gunung Bawah Laut Mahengetang dilaporkan memiliki karakteristik evolusi yang sangat mirip dengan karakteristik Gunung Krakatau. Untuk itu, dalam pembangunan jangka panjang ini, pengembangan kebijakan sistem mitigasi bencana alam dianggap sangat mendesak.

Isu Lingkungan Global Belum Dipahami dan Diterapkan dalam

Pembangunan Daerah. Indonesia telah meratifikasi 14 perjanjian internasional di bidang lingkungan sebagai respon terhadap kesadaran global tentang kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang semakin buruk. Akan tetapi, sosialisasi, pelaksanaan dan penataan terkait dengan perjanjian-perjanjian ini masih kurang mendapat perhatian.

Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Memelihara Lingkungan

Hidup. Masyarakat umumnya menganggap bahwa lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya. Pandangan ini telah mengakibatkan masyarakat tidak ikut serta memelihara lingkungan hidup yang makin diperparah dengan berbagai permasalahan mendasar seperti kemiskinan dan keterbelakangan.

Peraturan Perundangan Lingkungan Belum Harmonis. Hukum di

bidang lingkungan masih kurang bersinergi dengan peraturan di sektor lain. Hal ini menyebabkan inkonsistensi, tumpang tindih bahkan pertentangan peraturan perundangan di bidang lingkungan.

Proyeksi Keberhasilan

Perubahan kondisi geomorfologi dan penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Karakteristik wilayah dan kondisi masyarakat diduga akan sangat menentukan kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup di kabupaten ini. Beberapa isu krusial terkait dengan kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah ancaman krisis air, pengembangan sistem kewaspadaan dini, perambahan ke wilayah hutan lindung dan berbagai ekosistem di wilayah pesisir serta lemahnya penerapan hukum dan kesadaran masyarakat tentang fungsi lingkungan hidup.

Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu mengantisipasi ancaman krisis air. Hal ini berkorelasi dengan semakin memburuknya kondisi hutan (Sahendaruman, Siau dan Tagulandang) akibat DEFORESTASI serta ketidakseimbangan pemanfaatan lahan dan cadangan hutan kayu yang tersedia. Berkurangnya kawasan hutan menyebabkan terganggunya kondisi tata air yang berimplikasi tidak saja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari tetapi juga mempengaruhi pasokan untuk pembangkit

tenaga listrik (Ulung Peliang Tamako). Kecuali itu, membesarnya aliran permukaan mengakibatkan meningkatnya ancaman bencana banjir pada musim penghujan. Berkurangnya luas hutan juga berdampak terhadap ekosistem keanekaragaman hayati di dalamnya yang mempunyai potensi untuk pengembangan jasa-jasa lingkungan dan diversifikasi pangan.

Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak pada piringan tektonik Sangihe.

Menurut sejumlah laporan di bidang geologi dan astrofisika, piringan tektonik kecil ini sedang bergerak ke arah Timur sedangkan piringan Halmahera di bagian berlawanan sementara bergerak ke arah Barat sehingga diperkirakan pada suatu saat akan bertabrakan dan menekan Laut Maluku; suatu proses yang akan memicu munculnya gunung-gunung berapi aktif. Jika tidak disikapi dengan pengembangan sistem kewaspadaan dini, potensi bencana diperkirakan mengancam kehidupan manusia, flora, fauna dan infrastruktur yang telah dibangun seperti yang terjadi di NAD, Sumatra Utara, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, dalam program pem bangunan jangka panjang Kabupaten Kepulauan Sangihe pengembangan sistem mitigasi bencana alam sangat krusial. Sehubungan dengan pengembangan sistem ini, penguasaan teknologi yang mampu mengurangi dampak bencana amat strategis di samping pengembangan badan khusus yang akan menangani masalah bencana alam, ketersediaan informasi kawasan rawan bencana geologi yang dipetakan dengan saksama dan rencana tata ruang yang disusun dengan memperhitungkan secara teliti kawasan rawan bencana geologi, lokasi kegiatan ekonomi dan pembangunan wilayah yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan setempat.

Dari segi kemiringan, lahan potensial untuk usaha perkebunan adalah lahan dengan kelas kemiringan (15-40)%. Di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, luas lahan dengan kelas kemiringan ini hanya berkisar 40% dan sisanya adalah lahan dengan kemiringan >40% yang seharusnya menjadi kawasan konservasi menurut Kepres No. 32 tahun 1990. Akan tetapi, laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menunjukkan bahwa penggunaan lahan perkebunan pada tahun 2003 saja telah mencapai 72.798,4 ha atau 67,59% dari luas wilayah, tidak termasuk pemanfaatan untuk ladang/huma/tegal yang dilaporkan telah mencapai 14.93%. mni berarti bahwa selain telah terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan seperti antara kawasan tanaman lahan kering dengan perkebunan dan lahan perkebunan dengan lahan pertambangan juga telah terjadi perambahan ke wilayah hutan lindung. Jika tidak segera diantisipasi, perambahan ke wilayah hutan lindung diperkirakan akan semakin meluas dan membawa dampak sangat serius bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan laju tingkat kerusakan seperti saat ini, maka pada tahun 2015 luas kawasan hutan yang sekarang ini dilaporkan sekitar 550 ha diperkirakan hanya akan tersisa sekitar 50 ha. Menurut kajian LSM *Bird Life* pada tahun 2004, fungsi ekologis utama dari Kawasan Hutan Sahenderuman terdapat pada fungsi hidrologisnya. Secara umum, fungsi ini masih berkerja dengan baik dan normal sehingga masih mampu berperan sebagai penyedia air untuk berbagai keperluan penduduk, namun jasa ekologis untuk keperluan PLTM dan pengendalian banjir makin berkurang. Hasil kajian yang sama juga menunjukkan bahwa apabila terjadi banjir satu kali pada skenario tinggi, maka Kabupaten Kepulauan Sangihe akan mengalami kerugian sebesar Rp. 14,4 milyar sedangkan pada skala sedang dan rendah diperkirakan berturut-turut sebesar Rp. 7,2 dan Rp. 2,5 milyar. Dengan demikian, dukungan terhadap berbagai upaya pelestarian hutan lindung ini dan kawasan lindung lainnya sudah saatnya diberikan secara maksimal dan konsisten dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Peraturan perundangan lingkungan hidup yang masih kurang bersinergi dengan peraturan sektor lainnya di tingkat nasional maupun daerah diperkirakan masih akan menjadi kendala bagi upaya peningkatan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, keterbelakangan dan kebodohan yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya fungsi lingkungan hidup termasuk di wilayah pesisir dan laut juga diduga akan menentukan kondisi lingkungan hidup di masa mendatang. Sehubungan dengan hal ini, pengembangan hukum lingkungan di daerah termasuk upaya memadukannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat lebih tinggi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya fungsi lingkungan perlu terus diupayakan di samping penyempurnaan

upaya-upaya pemberdayaan masyarakat sebab tanpa harmonisasi hukum, kesadaran masyarakat dan ketersediaan kegiatan-kegiatan alternatif yang menguntungkan bagi masyarakat, maka upaya untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup akan sulit dicapai.

2.1.2. Demografi

Secara demografis, dinamika kependudukan merupakan hasil interaksi fungsional dari kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas dan mobilitas atau migrasi penduduk. Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Jumlah penduduk yang terus meningkat memerlukan sumber daya yang tidak sedikit untuk menunjang kehidupannya dan akan menjadi beban daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pembangunan, kondisi penduduk seperti kuantitas penduduk, kualitas penduduk, distribusi/persebaran penduduk dan angka kemiskinan merupakan faktor yang mempengaruhi. Kaitannya dengan kualitas penduduk, kekuatan Sumber Daya Manusia menempatkan faktor ketenagakerjaan sebagai salah satu dimensi yang vital dilihat dari angkatan kerja.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sejak tahun 1995-2004, jumlah penduduk kabupaten kepulauan Sangihe menunjukkan peningkatan. Dari hasil sensus penduduk dan catatan atau registrasi penduduk, jumlah penduduk kabupaten kepulauan Sangihe terus bertambah. Tahun 1995, jumlah penduduk sebanyak 191.108 jiwa pada tahun 2004 meningkat menjadi 192.363 jiwa. Meskipun jumlah penduduk bertambah, tapi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) menunjukan kecenderungan menurun yaitu dari 0,65% tahun 1990 menjadi -0,25% tahun 2001. Pertumbuhan ini terjadi secara alamiah sebagai konsekuensi logis dari perubahan proporsi penduduk menurut umur yang berdampak pada angka beban ketergantungan. Kecenderungan ini juga secara demografis berkaitan dengan adanya tingkat fertilitas yang menunjukan *replacement level* mendekati 2 anak dalam setiap keluarga. Juga disebabkan karena tingginya migrasi keluar daerah bagi penduduk usia sekolah yang melanjutkan studi dan penduduk angkatan kerja.

Tingkat fertilitas di kabupaten kepulauan Sangihe pada tahun 2000 sebesar 2,27 hasil Susenas tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 0,1 menjadi 2,26 yang pendekatannya adalah rata-rata anak lahir hidup perwanita kawin. Penurunan pertumbuhan penduduk terjadi karena menurunnya angka kelahiran, namun secara *absolute* penambahan penduduk masih akan terus meningkat rata-rata 0,56% pertah u n.

Persebaran penduduk secara demografis di kabupaten kepulauan Sangihe tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 1,46 jiwa per km², dengan kepadatan penduduk sebesar 184,91 km² dan yang tertinggi berada di klaster Sangihe Besar. Rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap perempuan pada tahun 2004 sebesar 101,86 dimana prosentase jumlah penduduk laki-laki sebesar 50,46% dan perempuan sebesar 49,54%.

Kondisi kependudukan saat ini kaitannya dengan kuantitas penduduk; memperlihatkan perubahan struktur penduduk dimana komposisi penduduk berdasarkan umur adalah jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk yang non produktif. Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk juga meningkat dari 60 tahun pada tahun 1995 menjadi 70 tahun pada tahun 2001

Penduduk usia 10 tahun keatas yang masuk dalam kelompok angkatan kerja 10-14 tahun sebesar 21,66%, Usia 15-49 tahun sebesar 56,54% dan usia 50-64 sebesar 21,80%. Angkatan kerja tersebut lebih banyak terserap pada sektor pertanian sebesar 73,51% diikuti sektor jasa-jasa 9,75%. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus bertambah seiring berlangsungnya proses demografi.

Permasalahan yang ada saat ini adalah:

1. Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian;
2. Jumlah persebaran penduduk yang belum seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai dengan wilayah;
3. Lebih dari 70% penduduk yang bekerja pada sektor informal berada pada sektor pertanian;

4. Tingginya angka kemiskinan penduduk yang secara proporsional meningkat setiap tahun hingga tahun 2004 mencapai 40,56% atau naik sebesar 4,77% dari tahun 2003;
5. Rendahnya tingkat elastisitas kesempatan kerja (pertumbuhan angkatan kerja melebihi pertumbuhan kesempatan kerja). Situasi ini menuntut terjadinya mobilisasi penduduk/migrasi keluar penduduk ke wilayah perkotaan karena kota merupakan daya tarik tersendiri bagi angkatan kerja untuk mencari pekerjaan, tingkat urbanisasi penduduk ke wilayah perkotaan karena kegiatan ekonomi dan pendidikan;
6. Kecenderungan yang terjadi di wilayah pedesaan, umumnya lapangan kerja informal yang tersedia pada sektor pertanian karena berkaitan erat dengan rendahnya kualitas pendidikan angkatan kerja itu sendiri sehingga daya serap dan adaptasi masyarakat terhadap teknologi rendah; dan
7. Kebijakan dan strategi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi wilayah belum mendukung pembangunan berkelanjutan.

Hal ini yang menjadi beban pembangunan terutama kaitannya dengan kualitas sumberdaya manusia. Dari gambaran mengenai kondisi kependudukan kabupaten kepulauan Sangihe dalam kurun waktu 1990-2004 diatas, secara umum upaya pembangunan kependudukan secara kuantitatif demografis telah mencapai angka-angka yang cukup berarti menuju pada kondisi demografi yang diinginkan. Meskipun dalam aspek pembangunan secara umum masih perlu dilakukan kebijakan pengendalian kependudukan. Integrasinya adalah manfaat mendasar yang diperoleh bahwa penduduk ada yang menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan yang perlu terus ditingkatkan kualitasnya.

Proyeksi Peluang

Dalam jangka pendek investasi sumber daya manusia memang tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam jangka panjang investasi tersebut memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Integrasi dimensi kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah manfaat mendasar yang diperoleh bahwa penduduk yang ada menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. Implementasi dari konsep *penduduk sebagai modal pembangunan* berbeda dengan modal lainnya seperti sumberdaya alam, sebab manusia sangat dinamis sebagai pelaku dan sasaran pembangunan.

Sebagai pelaku pembangunan, penduduk memberi peluang bagi banyak hal yang dapat dikerjakan. Dalam skala kecil, keluarga/penduduk sebagai modal akan bermakna dengan adanya tenaga yang dapat melakukan sesuatu yang menghasilkan, bernilai banding terhadap penduduk yang lain. Dalam skala besar, penduduk dalam satu daerah menjadi modal pemberi peluang sebagai sumber pemimpin, perencana, pelaksana dan tenaga kerja, dengan pertimbangan penduduk memiliki kualitas untuk terus dikembangkan.

Proyeksi Ancaman

Aspek lain yang diperhitungkan dari keadaan demografis penduduk adalah selain sebagai modal yang memberi peluang, juga penduduk menjadi ancaman terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hanya penduduk yang berkualitas yang menjadi modal pembangunan. Secara demografis, ancaman dalam meningkatkan kesejahteraan manusia, antara lain: Jumlah Penduduk dan Daya Dukung Lingkungan. Secara alamiah, jumlah penduduk kabupaten kepulauan Sangihe akan terus bertambah, sementara luas wilayah relatif tetap. Meskipun pengendalian jumlah penduduk secara mutlak akan menjadi besar dari tahun ke tahun dan tidak lagi dapat didukung oleh lingkungan.

Penduduk dan Ketersediaan Fasilitas Sosial. Jumlah penduduk yang meningkat dihadapkan pada keterbatasan penyediaan fasilitas sosial, menjadi sumber konflik dan dapat menghambat capaian pembangunan.

Kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk pada periode 2005-2025. Kecenderungan naiknya jumlah penduduk dan tidak meningkatnya intervensi terhadap variabel-variabel penyumbang pertumbuhan yang cenderung naik, maka semakin terbuka ancaman-ancaman yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk.

Perubahan Struktur Penduduk. Perubahan pada struktur penduduk membawa kesulitan tersendiri bagi pelayanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan pelayanan sosial lainnya. Jika hal ini tidak cukup memadai maka akan menghadirkan kerawanan-kerawanan sosial yang dapat digiring ke kerawanan politik.

Migrasi Masuk. Dalam era globalisasi ini, tidak ada satu daerah pun yang dapat mengembangkan kebijaksanaan daerah tertutup. Nilai-nilai sosial akan mengalami perubahan ke arah yang terbuka dan mengancam pembangunan.

Proyeksi Permasalahan

Kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan jumlah penduduk. Data statistik kependudukan menggambarkan bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dikatakan rendah yaitu 0,56% pertahun namun demikian apabila dikaji secara mendalam pertumbuhan penduduk yang rendah bukan saja dipengaruhi suksesnya program keluarga berencana di daerah ini melainkan ikut pula dipengaruhi oleh arus masyarakat (penduduk) yang keluar daerah karena alasan ekonomi/lapangan kerja yang rendah. Juga karena faktor pendidikan lanjutan bagi anak-anak didik di perguruan tinggi.

Permasalahan yang timbul sebagai akibat dari besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja menuntut tersedianya kesempatan kerja yang besar. Dipihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri untuk mampu menghasilkan keluaran (output) yang lebih tinggi. Lapangan kerja datang dari pertumbuhan ekonomi namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu memberikan lapangan kerja yang besar.

Sempitnya lapangan kerja lokal menyebabkan banyak penduduk melakukan migrasi ke tempat lain meskipun lapangan kerja bagi mereka relatif terbatas karena rendahnya kualitas yang dimiliki. Dalam aspek kuantitas penduduk, berhasil dikendalikan sedangkan dari aspek kualitas penduduk, menunjukkan kecenderungan rendah.

Persebaran dan mobilisasi penduduk berkaitan secara timbal balik dengan proses pembangunan yang terjadi di daerah apabila konsentrasi penduduk menurut sebaran tidak terkendali. Akan timbul berbagai persoalan lingkungan sosial seperti lingkungan kumuh, masalah kriminalitas, kemiskinan dan lain sebagainya yang dalam kurun waktu 20 tahun kedepan diharapkan dapat diatasi melalui upaya penanggulangan kemiskinan dan dilaksanakan dengan strategi pembangunan yang bertumpuh pada pertumbuhan ekonomi.

Proyeksi Keberhasilan

Penduduk Indonesia yang besar jumlahnya dan menempati urutan ke-4 terbesar di dunia merupakan Sumber Daya Manusia yang potensial bagi Pembangunan secara nasional (dan akan berpengaruh terhadap daerah). Dalam tahun 2005-2025 jumlah penduduk usia produktif diperkirakan akan meningkat, juga akan menjadi pangsa pasar yang efektif.

Dari berbagai data yang ada menunjukkan bahwa selama periode tahun 1995-2004 jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe meningkat, meskipun Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) cenderung turun. Selama periode 1995-2004 dengan pendekatan yang terencana, persepsi pembangunan yang berwawasan kependudukan telah terbentuk dan telah melahirkan usaha-usaha mengimplementasikan bentuk menuju keadaan Penduduk Tumbuh Seimbang demi terwujudnya pelembagaan

dan pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Dengan asumsi LPP 0,56% pertahun maka pada tahun 2010 penduduk kabupaten kepulauan Sangihe diperkirakan akan bertambah sekitar 2.157 jiwa atau 1,11%.

Estimasi kependudukan, melihat bahwa kecenderungan pertumbuhan penduduk antara tahun 1990-2000 rendah dan pada tahun 2005-2025 juga rendah, trend ini tidak menutup kemungkinan kedepan mencapai angka nol (*zero growth*).

2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Perkembangan perekonomian suatu daerah biasanya diukur dari ketersediaan sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk peningkatan jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh suatu daerah guna memenuhi kebutuhan penduduknya. Kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai pada tahun 2004 belum sepenuhnya menjanjikan meskipun beberapa variabel indikator pembangunan daerah secara gradual nampak mengalami peningkatan seiring dengan terjadinya perubahan atau perkembangan terutama akibat proses desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi.

Sumber daya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistim kehidupan. Peran sumber daya alam di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dilihat melalui sumbangannya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) yang pada tahun 2004 mencapai Rp.284.576 juta dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 55,95%. Dalam kaitan ini, sumber daya alam di Kabupaten Kepulauan Sangihe dibagi menjadi dua bagian besar yaitu SUMBER DAYA ALAM LAUT dan SUMBER DAYA ALAM DARAT. Khusus sumber daya alam darat yang hanya terdapat di kawasan kepulauan dengan luas 1.012,93 km² dari luas total wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe 20.258,60 km², keadaannya cenderung semakin kritis karena kelestariannya diabaikan. Sementara sumber daya alam laut yang mencakup 95% dari total luas wilayah belum dapat dikelola secara optimal (modern) karena berbagai keterbatasan sehingga belum mampu berproduksi secara maksimal.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan

(adhk) dan berlaku (adhb) yang merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian/lapangan usaha berturut-turut tercatat tumbuh rata-rata 1,89% dan 10,44% tiap tahunnya dengan capaian nilai rata-rata berturut-turut Rp. 284.540 juta dan Rp. 852,011 juta. Perbedaan nilai kedua komponen PDRB ini mencerminkan tingkat inflasi yang kian bertambah dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu lima tahun setelah krisis ekonomi, inflasi di daerah ini bertumbuh rata-rata 17,96% per tahun.

Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional secara nyata mengalami penurunan akibat krisis, hal ini tidak begitu berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tercatat meningkat rata-rata sebesar 2,25% per tahun, pendapatan perkapita mencapai Rp.4.077.018 dan jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi sebanyak 71.764 orang.

Struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak mengalami pergeseran berarti dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor primer terutama sektor pertanian tetap mendominasi dengan presentasi sebesar 45,1% diikuti sektor tersier dengan kontribusi rata-rata 42,8% dan sektor sekunder rata-rata sebesar 12,1% per tahun. Subsektor yang memberikan sumbangan terbesar pada sektor pertanian adalah subsektor perkebunan dengan kontribusi rata-rata sebesar 26,25%. Beberapa subsektor lain penyumbang PDRB di sektor pertanian adalah perikanan 8,82%, tanaman bahan makanan 3,43%, peternakan 2,06% dan kehutanan 0,02%. Di sektor perbankan, sampai akhir tahun 2004 jumlah kredit yang telah tersalurkan kepada masyarakat tercatat sebesar Rp.53,7 miliar. Dilihat dari segi penggunaan sampai posisi akhir tahun 2004, ternyata jumlah penyaluran kredit tersebut sebagian besar (53,2%) digunakan untuk modal kerja, 41,1% untuk konsumsi dan sisanya 5,7% untuk investasi. Seiring dengan makin meningkatnya jumlah penyaluran kredit perbankan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, posisi dana penyimpanan masyarakat cenderung menunjukkan *trend* meningkat yang pada akhir tahun 2004 tercatat sebesar

Rp.95,0 miliar. Jika dibandingkan dengan penyaluran kredit, maka jumlah dana simpanan masyarakat masih lebih besar. Selanjutnya pada sektor tersier, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Sangihe mencapai 54.325 orang, namun kunjungan wisatawan asing maupun domestik masih tergolong rendah dan bervariasi setiap tahun.

Proyeksi Permasalahan

Lambannya perkembangan perputaran roda perekonomian disebabkan oleh berbagai faktor berikut:

1. Walaupun berperan sebagai sektor basis dalam pembentukan struktur perekonomian daerah, kinerja sektor pertanian pada umumnya masih dilakukan secara tradisional untuk kepentingan konsumsi dan bukan untuk kepentingan produksi dalam rangka pembentukan modal. Hal ini dikarenakan sektor pertanian di daerah ini belum memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan nilai tambah sektorsektor lain;
2. Kegiatan perikanan (pembinaan ekonomi masyarakat/pem berdayaan masyarakat nelayan) yang seharusnya menjadi andalan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe ternyata belum memberikan kontribusi yang signifikan. Hal ini antara lain dikarenakan oleh kualitas SDM dan peralatan pendukung usaha perikanan belum memadai, ketidakmampuan mengakses pasar ekspor dan berbagai faktor lain yang menyebabkan nelayan berada pada posisi lemah;
3. Peran dan fungsi pelayanan lembaga-lembaga keuangan (perbankan) belum sepenuhnya menjabarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pelaku ekonomi kerakyatan (UKM dan Koperasi) disebabkan beragam permasalahan yang menjadi kendala dalam teknis operasional di lapangan yang serba kompleks dan dimensional dihubungkan dengan kondisi alam serta fasilitas pendukung yang berada di luar kapasitas dan kompetensi institusi yang bersangkutan;
4. Industri dan perdagangan, dua sektor penyedia lapangan kerja yang diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi belum menampakkan keadaan yang menggembirakan. Masalah yang dihadapi dalam pembinaan industri kecil dan menengah adalah lemahnya permodalan (mesin/peralatan industri), keterampilan tenaga kerja belum berkembang, kurangnya kemampuan penyerapan teknologi (tidak didukung latar belakang pendidikan yang sesuai) dan spesialisasi bidang industri belum dikuasai secara baik;
5. Di sektor perdagangan, permasalahannya meliputi kurangnya infrastruktur perdagangan (pasar/desa), belum adanya *border gate* sebagai *entry point* bagi para pedagang melakukan aktivitasnya;
6. Belum berkembangnya sektor pariwisata yang ditandai dengan rendahnya arus kunjungan wisatawan antara lain karena seluruh objek wisata belum dapat dikelola dengan baik dan profesional, terbatasnya infrastruktur dan sarana penunjang objek-objek wisata dan kemampuan institusi terkait dalam mengelola dan mempromosikan objek-objek wisata, menciptakan insentif-insentif bagi investor pariwisata, serta regulasi-regulasi pendukung untuk pengembangan sektor pariwisata;
7. Sumber daya alam di wilayah daratan sangat terbatas dan keadaannya semakin kritis sementara sumber daya alam laut belum dapat dikelola secara optimal karena faktor modal, peralatan, SDM serta keterbatasan dalam mengakses pasar; dan
8. Belum efektifnya pelayanan Imigrasi dan Kepabeanan (Bea Cukai) dalam kaitan dengan posisi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah perbatasan antara lain karena lemahnya peran dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan *Border Crossing Agreement*, kondisi kelembagaan, aturan pelaksanaan serta minat masyarakat dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.

Penerimaan Daerah Belum Dapat Diandalkan. Struktur penerimaan

daerah menunjukkan bahwa penerimaan daerah yang diharapkan dapat menunjang pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah masih belum dapat diandalkan, terlebih apabila dana tersebut murni diharapkan dari PAD yang peranannya selama ini hanya mampu menunjang APBD setiap tahunnya rata-rata sebesar 5,6% sehingga penerimaan sumbangan dan bantuan selama ini masih mendominasi pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Belum ada PMA dan PMDN yang melakukan investasi secara langsung ke Kabupaten Kepulauan Sangihe diduga karena belum terciptanya lingkungan usaha yang kondusif, belum dilakukan penyederhanaan berbagai perangkat peraturan dan formulasi sistem insentif, rendahnya kepastian hukum, terbatasnya kualitas tenaga kerja dan ketersediaan infrastruktur dasar serta prosedur perijinan investasi terlalu berbelit-belit yang tidak saja mengakibatkan ekonomi biaya tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha.

Belum Berkembangnya Industri Berbasis Sumber Daya Lokal.

Industri berbasis sumber daya lokal seperti agroindustri dan pariwisata serta produk-produknya amat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi hingga saat ini belum ada perkembangan berarti dari industri karena: (i) tidak kondusifnya kondisi-kondisi utama ekonomi makro, (ii) buruknya kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan, (iii) lemahnya kebijakan pengembangan teknologi, (iv) fasilitas pengembangan industri dan (v) terbatasnya insentif-insentif yang mampu menarik investor.

Ketersediaan Pangan semakin terbatas akibat meningkatnya konversi lahan pertanian produktif dan rendahnya produktivitas pertanian yang menyebabkan ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah sangat besar.

Belum Berkembangnya Pemanfaatan Hasil Hutan Non-Kayu Dan Jasa-Jasa Lingkungan. Hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan ekosistem hutan seperti nilai hutan sebagai sumber air, keanekaragaman hayati, keindahan alam dan kapasitas asimilasi lingkungan yang memiliki manfaat besar sebagai penyangga sistem kehidupan dan potensi ekonomi belum berkembang seperti yang diharapkan. Padahal, dewasa ini permintaan terhadap jasa lingkungan mulai meningkat khususnya untuk air minum kemasan, objek penelitian, wisata alam dan lain sebagainya.

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Belum Optimal. Kabupaten Kepulauan

Sangihe terdiri dari 112 pulau kecil yang hingga saat ini kurang mendapat perhatian dan tersentuh oleh pembangunan. Pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan alam karena daya dukung lingkungan terbatas dan cenderung memiliki spesies endemik tinggi. Bird Life misalnya melaporkan setidaknya ada 6 spesies burung endemik. Hal penting lainnya khususnya di pulau-pulau perbatasan adalah konflik dengan pihak asing. Untuk itu, perhatian khusus harus diberikan untuk pembangunan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan dengan menggunakan pendekatan pengelolaan pulau-pulau kecil secara integratif sebagai dasar pengembangannya dan bukan semata-mata pendekatan kontinental seperti yang diterapkan selama ini.

Proyeksi Peluang

Kontribusi sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di sektor ini cukup dominan. Hal ini antara lain terlihat pada saat terjadi tekanan ekonomi pada tahun 1997 sampai dengan awal tahun 2000. Pada saat itu, perekonomian daerah ini tidak banyak terpengaruh oleh kontraksi ekonomi nasional yang berarti bahwa sektor pertanian masih lebih dapat bertahan dalam siklus ekonomi pada saat terjadi tekanan ekonomi dibandingkan sektor lainnya. Akan tetapi, masih diperlukan berbagai upaya pembenahan guna mengarahkan atau mengalihkan pola tradisional ke arah yang lebih *modern* dan produktif untuk dapat memanfaatkan peluang pasar nasional dan internasional yang cukup terbuka bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga efek ganda (*multiplier effects*) terhadap pertumbuhan sektor lain yang pada gilirannya akan membentuk

pondasi ekonomi yang kokoh dapat dicapai.

Dalam kaitan upaya pengembangan nilai tambah sumber daya alam dan penggalian sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru agar memiliki daya saing global jangka panjang dan mempunyai peluang untuk dikembangkan adalah SUMBER DAYA KELAUTAN. Berbeda dengan sumber daya alam lain yang dibatasi oleh wilayah kedaulatan Negara, SUMBER DAYA KELAUTAN dan PERIKANAN dimungkinkan pengelolaannya di wilayah ZONA TAMBAHAN yaitu ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) yang jaraknya sampai 200 mil. Pada sisi lain, bidang kelautan (matra laut) yang mencakup perhubungan laut, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan lainnya sangat penting untuk terus dibenahi dan dimantapkan fasilitasnya untuk menjadi tumpuan masa depan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sehubungan dengan posisi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah perbatasan, meskipun hubungan kerja sama subregional di bawah payung *Border Crossing Agreement* (BCA) telah berkembang secara negatif karena aturan-aturan yang disepakati dalam Perjanjian Lintas Batas tidak lagi dapat menampung kebutuhan-kebutuhan riil kedua belah pihak, namun dari segi ekonomi praktek perdagangan bebas ilegal itu telah memberi manfaat bagi penduduk di wilayah BCA dan sebagian pulau di Sangihe besar. Posisi strategis daerah perbatasan sebagai pintu gerbang di bagian utara Nusantara bagi lalu lintas manusia, barang dan modal sangat memungkinkan diberdayakan/ditingkatkan menjadi hubungan kerjasama saling menguntungkan bagi kedua negara bertetangga dalam rangka memasuki pelaksanaan kerjasama interregional di kawasan Asia dan Pasifik (BIMP-EAGA, ASEAN dan APEC) yang diyakini akan memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan sektor-sektor ekonomi daerah.

Proyeksi Ancaman

Kondisi Sektor Riil Belum Menunjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat menjaga kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan. Hingga sekarang, sektor riil belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan lemahnya investasi, rendahnya daya saing dan tingkat inflasi tinggi terutama karena faktor aksesibilitas rendah yang mengakibatkan daerah ini selalu terjebak pada masalah ekonomi biaya tinggi. Tanpa pembenahan, kondisi ini diduga akan menjadi ancaman serius bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe karena akan berdampak pada terbatasnya penciptaan peluang kerja, tingginya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin serta migrasi keluar penduduk.

Faktor Eksternal seperti Globalisasi yang berpotensi menimbulkan

gejolak ekonomi merupakan salah satu ancaman yang perlu diwaspadai oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe. Globalisasi perdagangan dunia diduga akan menyebabkan perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin terbuka sehingga akan mempengaruhi tingkat inflasi di daerah ini. Untuk itu, kesiapan menghadapi globalisasi perekonomian guna mendapatkan keuntungan maksimal dan mengurangi kerugian akibat persaingan global melalui pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan efektif merupakan suatu keharusan.

Pencurian Ikan dan Pola Penangkapan Ikan Destruktif Makin Marak.

Pencurian ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diperkirakan menyebabkan kerugian yang tidak kecil setiap tahunnya. Hal ini semakin diperburuk oleh upaya pengendalian dan pengawasan yang belum optimal akibat kurangnya sarana dan alat penegakan hukum di laut. Selain itu, jumlah dan kapasitas petugas pengawasan, sistem pengawasan, partisipasi masyarakat serta koordinasi antar instansi terkait masih lemah. Sementara itu, penangkapan destruktif seperti penggunaan bahan beracun masih terus berlangsung.

Pemanfaatan Lahan. Meskipun pemanfaatan lahan seperti sawah dilaporkan baru mencapai 30% dari luas total 302 ha sehingga upaya ekstensifikasi masih berpotensi dikembangkan, tetapi luas lahan sedemikian hanya terdapat di kecamatan tertentu saja dan pemanfaatan lahan lainnya (perkebunan, hutan rakyat, bangunan, dll.) dilaporkan telah mencapai 95% dari luas keseluruhan lahan 107.397,3 ha, bahkan sudah ada indikasi tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan. Jika tidak segera diantisipasi dengan

penetapan batas wilayah secara tegas dan cermat, konflik pemanfaatan bukan tidak mungkin terjadi di masa mendatang mengingat ketersediaan lahan yang sangat terbatas dan berbagai sumber daya potensial termasuk pertambangan belum terpetakan.

Proyeksi Keberhasilan

Memperhatikan kondisi perekonomian dan sumber daya alam Kabupaten Kepulauan Sangihe, prediksi ekonomi dan sumber daya alam tahun 2005-2025 sebagai berikut:

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan meningkat 8,0% pada tahun 2015 dan akan tumbuh menjadi 11% pada tahun 2025. Prioritas pembangunan adalah membuka lapangan kerja pada tiap sektor ekonomi sehingga terjadi pengurangan penduduk miskin, jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5% dari jumlah penduduk di daerah. Dengan meningkatnya trend laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka pada tahun 2025 akan tercipta kesempatan kerja yang cukup besar di sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan kehutanan), sektor tersier dan sektor manufaktur. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 0,56% per tahun, maka pendapatan perkapita pada tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp 8.400.193 dan menjadi Rp 12.167.779 pada tahun 2025. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi di atas, sektor yang dikembangkan adalah sektor yang berbasis perikanan, pariwisata dan UKM dengan memberdayakan ekonomi kerakyatan.

Tetap Terjaganya Stabilitas Ekonomi. Berbagai kebijakan ekonomi akan diarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Kondisi ini akan terus dijaga dan harga komoditi unggulan Daerah perlu distabilkan/ditingkatkan guna menjaga *supply-demand* yang seimbang. Laju inflasi pada tahun 2015 dan pada tahun 2025 diperkirakan berada di bawah 2 digit angka. Perkiraan tersebut didasarkan dengan sasaran tingkat inflasi yang rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi daerah. Keuangan Daerah. Upaya untuk mewujudkan kesinambungan penerimaan fiskal daerah terus digalakan dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Di sisi penerimaan daerah, berbagai upaya untuk peningkatan penerimaan pajak terus dilanjutkan. Penerimaan pajak akan meningkat tahun 2025 terutama akibat peningkatan harga BBM. Sejalan dengan kebutuhan pembangunan Daerah maka dana dari PAD, DAU, DAK, dana dekonsentrasi dari pemerintah meningkat, dana dari masyarakat swasta diharapkan meningkat hingga tahun 2025.

Pengelolaan Sumber Daya Alam. Efektivitas pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi, dengan berbagai kebijakan penerapan pola pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada tahun 2025 terus diupayakan titik keseimbangan antara eksploitasi SDA dan pertumbuhan ekonomi agar tingkat pengurusan SDA tidak sampai pada tingkat yang mengancam kehidupan masyarakat di daerah.

2.1.4. Sosial Budaya dan Politik.

Pembangunan bidang sosial budaya dan politik terkait erat dengan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kondisi kehidupan masyarakat tercermin dari jumlah dan komposisi penduduk serta kualitas seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Secara umum, kondisi sosial budaya dan politik daerah ini dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Dari aspek kehidupan beragama, kesadaran melakukan ibadah keagamaan telah berkembang dengan baik. Hal ini antara lain didukung oleh menguatnya kesadaran di kalangan pemuka agama untuk membangun harmonisasi sosial dan hubungan *intern* dan antar umat beragama guna menciptakan rasa aman, damai dan saling menghargai di antara umat beragama melalui wadah seperti BKSUA yang telah memberikan kontribusi cukup besar dalam menjamin kerukunan hidup umat beragama. Selain pertumbuhan secara spiritual, pertumbuhan fisik berupa sarana dan prasarana peribadatan yang dibangun atas swadaya masyarakat maupun melalui dukungan dari pemerintah daerah juga tercatat meningkat seiring dengan peningkatan jumlah umat beragama. Dari 472 buah gedung gereja dan 143.940 pemeluk agama Kristen Protestan pada tahun 1995 telah bertambah menjadi 541 gedung gereja dan 180.326 orang pemeluk pada tahun 2005. Peningkatan serupa dalam 1 dekade terakhir juga terjadi pada agama Kristen Katolik dan Islam.

Pada tahun 1995, tercatat sebanyak 8 buah gedung gereja dan 1.798 orang pemeluk agama Kristen Katolik, namun pada tahun 2005 telah berkembang menjadi 12 gereja dan 1.848 pemeluk agama ini. Sementara untuk agama Islam, pada periode yang sama jumlah mesjid dan umat bertambah dari 84 buah dan 26.025 jemaah menjadi 92 buah mesjid dan 26.025 jemaah. Meskipun demikian, sejumlah keberhasilan ini belum mampu menjamin kualitas keimanan dan ketaqwaan per individu Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku asusila, pemabukan, penyalahgunaan kekuasaan, perjudian, perceraian, pengrusakan lingkungan dan perbuatan tercela lainnya serta pelanggaran hukum yang tetap berlangsung hingga sekarang menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara ajaran agama dengan pelaksanaan pengamalannya. Hal ini juga dapat dilihat dari rendahnya perwujudan ajaran-ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi dan dorongan untuk mencapai kemajuan bersama sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun serta rendahnya perwujudan pesan-pesan moral agama dalam kehidupan sehari-hari.

Dari aspek budaya, Kab. Kepl. Sangihe memiliki aneka ragam budaya dan nilai tradisi yang potensial dikembangkan. Aneka budaya dan tradisi itu masih terpelihara di tengah kehidupan masyarakat. Sejumlah upacara tradisional antara lain Upacara Adat Tulude dan kesenian daerah lainnya sangat menunjang tumbuhnya rasa nasionalisme dan pembangunan ekonomi daerah. Ragam budaya masyarakat di daerah ini termasuk spesifik dan unik dibandingkan dengan budaya masyarakat di daerah lain. Namun demikian, potensi budaya yang cukup besar ini belum mampu dikelola dengan baik sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan di daerah ini. Di sisi lain, upaya pembangunan jati diri seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air semakin memudar. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh belum optimalnya upaya pembentukan karakter, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya taat hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang bersifat negatif, serta belum meratanya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Taraf pendidikan penduduk tercatat mengalami peningkatan yang antara lain dapat diukur melalui angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas pada 3 tahun terakhir. Pada tahun 1995, angka ini tercatat sebesar 85,5% namun telah meningkat menjadi 89,5%. Demikian pula angka penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat pendidikan SMPA/MTs ke atas, pada tahun 1995 angka yang terdokumentasi sebesar 27,5% namun pada tahun 2000 naik menjadi 42,800 dan awal tahun 2005 telah mencapai 45,8%. Perbaikan taraf pendidikan tersebut didorong oleh peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) atau presentase penduduk yang bersekolah pada kelompok usia dan angka melanjutkan yang pada awal tahun 2005, Angka Partisipasi Sekolah penduduk 7-12 tahun sebesar 86,38% dan usia 13-15 tahun sebesar 74,01% serta penduduk usia 16-18 tahun mencapai 31,51%. Sementara angka melanjutkan untuk lulusan SD, SDLM/MI ke jenjang SMP/MTS/Paket B adalah 88,04% dan angka melanjutkan SMP/MTs/Paket B ke jenjang pendidikan menengah tercatat sebesar 64,65 persen. Akan tetapi, kondisi kualitas pendidikan sedemikian belum dapat diandalkan untuk menghadapi persaingan global sehingga berbagai terobosan dalam pembangunan pendidikan masih diperlukan terutama untuk meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan menurunkan jumlah penduduk buta aksara melalui penyelenggaraan pendidikan yang makin berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Dari aspek kualitas kesehatan, peningkatan status kesehatan tercermin dari usia Harapan Hidup dan menurunnya angka kurang gizi pada balita. Data menunjukkan usia Angka Harapan Hidup selang tahun 1990-2002 adalah 61,5 tahun dan pada tahun 1990 menjadi 62,2 tahun pada tahun 2002. Sementara angka kematian bayi (AKB/IMR), pada tahun 1990 sebesar 61,8 per 1000 lahir hidup (Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud) menjadi 35 per 1000 lahir hidup (Kabupaten Kepulauan Sangihe) pada tahun 2002. Kecenderungan angka kematian bayi yang demikian menyatakan bahwa kesehatan penduduk cukup baik yang ditandai dengan perbaikan gizi dan perubahan perilaku penduduk. Selanjutnya, angka kematian ibu melahirkan tahun 1999 sebanyak 390 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2000 menurun 307 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kurang gizi pada balita pada tahun 1990 sebesar 37,5% menurun pada 2000 sebesar 24,6%. Namun demikian, disparitas status kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi dan gender masih cukup lebar. Selain itu, masalah kesehatan masyarakat menghadapi beban ganda penyakit, yaitu di satu pihak masih banyaknya

penyakit infeksi menular yang harus ditangani, di pihak lain mulai meningkatnya penyakit tidak menular. Di samping itu, status kesehatan masyarakat masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh daerah lain di tingkat provinsi maupun secara nasional.

Dari aspek politik, perkembangan proses demokratisasi sejak tahun 1997 hingga selesainya proses Pemilu tahun 2004 yang lalu telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masa transisi demokrasi menuju arah konsolidasi demokrasi. Salah satu kebijakan strategis adalah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang berimplikasi kepada pemekaran provinsi, kabupaten dan kota memberikan ruang yang lebih leluasa kepada masyarakat guna mempercepat pembangunan daerah. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Dalam hubungan ini, partisipasi masyarakat diberi ruang yang cukup dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan. Namun demikian, dinamika pembentukan, perubahan dan jalannya sistem politik sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan masa Orde Baru belum mampu membangun fondasi yang kokoh bagi berkembangnya demokrasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam kurun waktu sampai dengan Era Orde Baru tersebut, kehidupan sosial politik didominasi oleh kekuatan eksekutif yang bersifat sentralistik didukung oleh kekuatan militer. Birokrat tidak netral dan menjadi pendukung utama kekuasaan penguasa. Sistem kepartaian didominasi oleh partai tertentu, tidak terjadinya hak politik rakyat, budaya paternalistik yang sempit, penyelenggaraan Pemilu belum dilakukan dengan jujur dan bersih, serta kurangnya kebebasan dan media masa pada umumnya. Dari aspek pemberdayaan perempuan dan anak serta pemuda telah pula menunjukkan peningkatan ditandai dari semakin baiknya kualitas hidup perempuan dan anak serta partisipasi pemuda dalam pembangunan juga semakin membaik seiring dengan budaya olahraga yang makin meluas di kalangan masyarakat.

Taraf kesejahteraan sosial masyarakat telah cukup memadai sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Meskipun demikian kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik masih rendah. Itulah sebabnya, pembangunan kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting. Sumber daya manusia (SDM) merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan hingga akhir hayat. Kualitas SDM menjadi semakin baik antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang secara rinci nilai indeks tersebut merupakan komposit dari Angka Harapan Hidup saat lahir, Angka Melek Aksara penduduk usia 15 tahun ke atas (gabungan angka partisipasi kasar jumlah pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi) serta Pendapatan Domestik Bruto Per-Kapita yang dihitung berdasarkan prioritas daya beli (*purchasing power parity*). Akan tetapi, nilai-nilai ini relatif rendah jika dibandingkan dengan banyak daerah di Indonesia terutama kawasan barat. Selanjutnya, gambaran kondisi sosial budaya dan politik akan dilengkapi dengan analisis proyeksi peluang, ancaman, permasalahan dan keberhasilan yang sifatnya mendorong atau sebaliknya menghambat perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam periode 20 (dua puluh) tahun ke depan sebagai berikut:

Proyeksi Peluang

Komunitas Kepulauan Sangihe sebagai masyarakat religius diyakini sebagai umat yang senantiasa diberkati Tuhan. Demikian pula kehidupan sosial kemasyarakatan yang dilandasi rasa kekeluargaan yang terus terpelihara. Realitas ini akan semakin menjamin dan terbinanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama terutama kebebasan dalam menjalankan ibadah keagamaannya sekaligus akan mendorong dan memberikan peluang terciptanya iklim yang kondusif bagi upaya-upaya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Implementasi otonomi daerah dengan kebijakan desentralisasi yang terus bergulir dewasa ini, memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah dalam merancang akselerasi pembangunan di bidang sosial budaya dan politik yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan enam klaster pengembangan.

Khusus pengembangan pendidikan, kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Amandemen UUD 1945 secara tegas telah mengatur bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan,

pemerintah wajib menyediakan alokasi dana minimal 20% dari Anggaran Pembangunan untuk bidang pendidikan. Kebijakan ini memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan sejumlah program kegiatan yang belum mampu dibiayai melalui kemampuan anggaran daerah. Disamping itu, keberpihakan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) tahun 2004-2009 berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pendidikan bagi daerah perbatasan dan daerah tertinggal terutama dalam mengurangi kesenjangan dalam pelayanan pendidikan.

Di bidang politik, perkembangan proses demokrasi sejak tahun 1997 hingga selesainya proses Pemilu tahun 2004 lalu telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju ke arah proses konsolidasi demokrasi. Dengan adanya penataan kembali kewenangan eksekutif, legislatif dan yudikatif termasuk di dalamnya kekuasaan dari lembaga-lembaga yang baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai wujud pelaksanaan Amandemen UUD 1945 yang telah mengubah dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara baik pada tatanan suprastruktur maupun infrastruktur politik telah memberikan peluang kearah terwujudnya keseimbangan kekuasaan.

Di bidang kesehatan, pengembangan daya saing SDM untuk mendukung komitmen Pemerintah yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan kesehatan berkelanjutan (sustainable) dan mandiri sangat mungkin dikembangkan karena berbagai peluang berikut: (i) Adanya komitmen Pemerintah Pusat dalam mengembangkan daerah perbatasan; (ii) Kawasan perbatasan memiliki peluang kerjasama antar kawasan dan kerjasama dengan negara tetangga, (iii) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, (iv) Adanya insentif bagi tenaga kesehatan di wilayah terpencil/pulau-pulau, (v) Tersedianya sarana pendidikan kesehatan seperti Akademi Perawat yang merupakan aset daerah untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan di daerah, (vi) Banyaknya kegiatan magang dan simposium bersertifikasi yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas SDM kesehatan; dan (v) Terbukanya berbagai kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan lebih tinggi melalui berbagai tawaran beasiswa untuk studi di dalam maupun luar negeri.

Proyeksi Ancaman

Dalam kaitannya dengan pembangunan bidang sosial budaya dan politik, kualitas kehidupan manusia dan masyarakat kabupaten kepulauan Sangihe terkait erat dengan kondisi kehidupan masyarakatnya. Sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia, masyarakat di kabupaten kepulauan Sangihe adalah masyarakat yang majemuk (*plural society*) baik dari segi agama maupun kehidupan sosial lainnya.

Seiring dengan tuntutan global, kehidupan sosial budaya masyarakat turut mengalami dampak globalisasi dan modernisasi yang secara perlahan menyebabkan pergeseran nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan kehidupan politik. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman kehidupan beragama yang mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama menghadapi berbagai ancaman yang mengatasnamakan agama, simbol-simbol keagamaan yang bersifat memecahkan kerukunan umat beragama dan tidak dilandasi nilai-nilai luhur agama.

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang belum merata di wilayah kabupaten kepulauan Sangihe terutama untuk daerah perdesaan, wilayah terpencil dan kepulauan dengan penyediaan tenaga pengajar/guru terbatas sangat mempengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia disamping itu pula pemerintah daerah belum mampu menyediakan pelayanan dasar secara cuma-cuma bagi anak didik yang tidak mampu.

Dalam bidang kesehatan kabupaten kepulauan Sangihe menunjukkan peningkatan, meskipun demikian dalam upaya untuk terus meningkatkan derajat kesehatan dan memperoleh pelayanan yang berkualitas berbagai ancaman sosial ekonomi serta perubahan lingkungan strategis global dan nasional seperti *Millennium Development Goals* (MDGs) dan desentralisasi bidang kesehatan.

Perkembangan pembangunan politik khususnya politik perempuan serta partisipasi anak dalam pembangunan membentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultur masyarakat yang bias gender. Dalam konteks sosial ini ancaman yang dihadapi adalah masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan, keterlibatan dalam pendidikan yang lebih tinggi dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas seperti kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Juga masih adanya hukum dan peraturan perundangundangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak.

Proyeksi Permasalahan.

Di masa yang akan datang, tatanan kehidupan sosial budaya dan politik dalam masyarakat akan menghadapi banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan pembangunan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, permasalahan sosial, dan politik dalam bingkai kehidupan sosial budaya dan politik diperkirakan semakin sukar. Apabila ciri-ciri kehidupan sosial masyarakat, politik maupun budaya mengikuti sistem global, maka ini berarti bahwa pertumbuhan sosial budaya dan politik masyarakat bersentuhan langsung dengan sumber daya manusia dan ukuran kualitas ini adalah derajat pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat.

Dari aspek kehidupan beragama, kesadaran masyarakat dalam kehidupan beragama belum mampu sepenuhnya menjamin kualitas kehidupan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemampuan sistem pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu masih memerlukan berbagai upaya sistematis, terarah dan berkelanjutan guna meningkatkan relevansinya dengan kebutuhan-kebutuhan yang semakin bervariasi. Dari aspek budaya, upaya pembentukan karakter, kurangnya keteladanan, lemahnya budaya taat hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang bersifat negatif serta tidak meratanya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat masih merupakan permasalahan yang akan dihadapi. Dari aspek kesehatan, disparitas status kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi dan gender masih cukup lebar. Pemberdayaan perempuan terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik masih rendah. Selain itu, dinamika politik masih belum mampu membangun fondasi yang kokoh dalam perkembangan demokrasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Adapun berbagai permasalahan terkait dengan pembangunan sosial budaya dan politik di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan pendidikan dan tingkat pendidikan masih relatif rendah;
2. Terbatasnya jumlah tenaga guru/pengajar terutama di wilayah pulau-pulau;
3. Tenaga dokter, tenaga paramedis belum tersebar secara merata di daerah terpencil, karena wilayah perkotaan masih menjadi pilihan dalam bekerja;
4. Terbatasnya sarana dan peralatan puskesmas;
5. Tuntutan demokratisasi dalam kehidupan politik yang belum menjamin tatanan kehidupan demokrasi;
6. Potensi budaya yang cukup besar belum sepenuhnya mampu dikelola dengan baik;
7. Kehidupan sosial politik didominasi oleh kekuasaan eksekutif yang bersifat sentralistik yang didukung oleh kekuatan militer;
8. Sistem kepartaian didominasi oleh partai tertentu, tidak terjadinya hak politik rakyat, budaya paternalistik yang sempit;
9. Potensi wilayah perbatasan dibawah payung BCA, untuk memfasilitasi kunjungan antara masyarakat pulau-pulau perbatasan di wilayah Republik Indonesia berkembang secara negatif karena aturan tidak lagi mampu menampung kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat kedua belah pihak (RI-Philipina);
10. Perilaku pemabukan, penyalagunaan kekuasaan, perjudian, perceraian, pengrusakan lingkungan masih akan berlangsung;

11. Pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari;
12. Dari aspek budaya, potensi budaya yang cukup besar belum mampu dikelola dengan baik sehingga belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan daerah; dan
13. Kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai budaya, bahasa dan solidaritas, rendahnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya taat hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang bersifat negatif dan tidak meratanya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Proyeksi Keberhasilan

Dari berbagai dinamika kehidupan sosial budaya dan politik masyarakat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi 20 tahun ke depan akan terjadi prioritas pembangunan terutama dalam upaya mengatasi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat khususnya perempuan serta tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan.

Sikap budaya dan perilaku politik yang dikembangkan dititikberatkan pada proses penanaman nilai-nilai demokrasi terutama penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia, nilai-nilai persamaan serta nilai-nilai toleransi politik, melalui berbagai wacana dan media dalam bidang kesehatan, peningkatan derajat kesehatan lebih diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan melalui pemberdayaan kesehatan dengan memperhatikan karakteristik Daerah dan Klaster Kepulauan terutama pada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, dan yang berada di daerah bencana.

Peningkatan kualitas pendidikan lebih diarahkan pada harkat, martabat dan kualitas SMD, sehingga perlu penyediaan sarana dan pendukung pembelajaran yang memadai dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan terjangkau semua jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi daerah.

Sistim jaminan sosial dikembangkan bagi seluruh rakyat sebagai wacana pengembangan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan dan diupayakan tidak merusak budaya yang telah berakar di masyarakat.

Keberadaan kehidupan umat beragama, adat budaya dan tradisi-tradisi sangat menunjang pelaksanaan pembangunan disamping iklim bersifat kondusif dalam pengembangan demokrasi di berbagai bidang aspek kehidupan serta adanya wadah BKSUA, kerukunan antar umat beragama yang didukung oleh saran peribadatan.

2.1.5. Prasarana dan Sarana.

Bidang Sarana dan Prasarana yang meliputi sumberdaya air, transportasi, telekomunikasi dan kelistrikan serta perumahan dan permukiman sampai saat ini kondisi pelayanan dan penyediaan umumnya belum berperan secara optimal, baik kualitas dan kuantitas.

Sebaran dan ketersediaan sumberdaya air di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat bervariasi; pada wilayah pulau-pulau kecil ketersediaan sumberdaya air merupakan masalah yang dijumpai hampir setiap tahun. Untuk pulau besar, masalah yang timbul lebih banyak disebabkan oleh kondisi lingkungan yang makin tidak kondusif sehingga makin mempercepat kelangkaan air. Kerusakan lingkungan antara lain disebabkan oleh terjadinya degradasi daya dukung daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh kerusakan hutan dengan ditandai meluasnya lahan kritis.

Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumberdaya air untuk pengendalian daya rusak air terutama untuk pengendalian banjir dan pengairan, sampai saat ini masih belum memadai. Hal ini terlihat dengan lemahnya koordinasi kelembagaan dan ketatalaksanaan sumberdaya air yang antara lain berdampak kegiatan pertambangan bahan bangunan yang tidak terkontrol yang dilakukan oleh kontraktor proyek maupun masyarakat serta adanya perambahan hutan dan pembukaan lahan perkebunan baru. Walaupun demikian telah diupayakan sejumlah program dan kegiatan untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumberdaya air di daerah ini antara lain program kegiatan Survei Identifikasi Sungai yang ada

di wilayah Sangihe, pembangunan saluran irigasi, normalisasi/penataan rawa pasang surut, pemeliharaan/perbaikan alur sungai maupun survey geolistrik air tanah.

Keberadaan geografis wilayah dengan karakteristik kepulauan yang tidak didukung oleh fasilitas transportasi yang memadai telah melahirkan masalah tersendiri terhadap Manajemen Pemerintahan di Kabupaten ini, yang terindikasi antar lain melalui LAMBANNYA PELAYANAN PUBLIK dan dorongan terhadap KINERJA PEREKONOMIAN, karena belum terciptanya kesetaraan dan keseimbangan penguatan akses antarpulau dan klaster-klaster yang ada.

Selama sepuluh tahun terakhir, pembangunan prasarana jalan diperhadapkan dengan beberapa permasalahan seperti aspek kapasitas, kondisi/jumlah dan kualitas prasarana dan sarana fisik, kelembagaan dan peraturan, sumber daya manusia, teknologi pendanaan dan investasi, manajemen, operasi dan pemeliharaan. Disamping itu kondisi jalan provinsi dan kabupaten cenderung mengalami penurunan disebabkan kualitas konstruksi jalan yang belum optimal, pembebanan berlebihan, bencana alam seperti longsor, banjir dan gempa bumi serta menurunnya kemampuan pembiayaan pemeliharaan jalan oleh pemerintah.

Ruas-ruas jalan/jembatan terutama di pulau-pulau besar seperti Sangihe, Siau dan Tagulandang belum secara optimal mendukung kelancaran arus distribusi barang-barang konsumsi ke pelosok pedesaan. Demikian pula mobilitas barang-barang dari sentra-sentra produksi di pelosok pedesaan ke pusat-pusat pemasaran di tiap pulau maupun wilayah pulau, disamping itu dalam pelaksanaan pembangunan prasarana jalan juga diperhadapkan pada rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, misalnya dalam hal tuntutan ganti rugi dan harga sewa tanah yang terlalu berlebihan mengakibatkan berpengaruh terhadap pembukaan jalur jalan baru.

Keberadaan sebagai daerah kepulauan diperhadapkan dengan terbatasnya jumlah prasarana dan sarana penyeberangan serta pelayanan angkutan penyeberangan untuk menjangkau dan melayani kebutuhan angkutan antar pulau dan wilayah terpencil.

Walaupun diperhadapkan pada sejumlah permasalahan, pembangunan sektor perhubungan darat di daerah ini dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan dan kemajuan, baik dalam penyediaan sarana maupun prasarana penunjang kegiatan seperti pembangunan/peningkatan atau rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan terminal/halte penumpang, Penambahan sarana dan prasarana keselamatan jalan, Terbangunnya 2 (dua) dermaga penyeberangan fery.

Pembangunan/peningkatan atau rehabilitasi jalan dan jembatan berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan kuantitas jalan di daerah ini. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya panjang jalan, pada tahun 1995 panjang jalan provinsi sepanjang 180,13 km dan jalan kabupaten 361,65 km, dan pada akhir tahun 2004 panjang Jalan Kabupaten mencapai 479,80 km, sedangkan untuk jalan provinsi, sesuai dengan Surat Dirjen Prasarana Wilayah Nomor: UM.0103-Dp/336.1 tanggal 8 Agustus 2002 dan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 375/KPTS/M/2004 dan Nomor: 376/KPTS/M/2004 telah terjadi perubahan status jalan yaitu menjadi jalan; Jalan Nasional sepanjang 87,45 km, Jalan Provinsi 92,68 km. Selain itu juga telah terbangun beberapa terminal penumpang di beberapa ibukota kecamatan, 2 buah dermaga fery di Pananaru dan Sawang Bandil Siau Timur Selatan serta. Terealisasinya bantuan Pemerintah Pusat berupa armada angkutan darat perintis (Bus Damri 2 Buah) serta subsidi untuk pengoperasiannya yang berada di pulau Sangihe.

Fasilitas transportasi laut yang diharapkan dapat berfungsi sebagai jembatan maritim guna merangkai seluruh klaster kepulauan di Kabupaten Sangihe agar boleh berintegrasi dan bersinergi secara kompak ke dalam dinamika sistem mata rantai pembangunan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara maupun dalam konsep pengembangan secara Nasional dalam kaitan pembinaan kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan, hingga kini dirasakan sangat sulit untuk mewujudkannya, mengingat minimnya pembiayaan, serta faktor-faktor lain yang bertalian dengan kebijakan secara Nasional yang perlu penyesuaian dengan kebutuhan riil di Daerah ini. Saat ini kebutuhan akan sarana angkutan laut lebih tergantung pada peran swasta, ketersediaan akan sarana transportasi laut untuk merangkai keseluruhan pulau belum memadai. Hal yang sama juga dirasakan pada pengembangan transportasi udara, minimnya

pembiayaan untuk pen ingkatan fasilitas di Bandara Naha turut berpengaruh terhadap upaya Pemerintah guna menjadikan bandara ini mempunyai PERAN YANG STRATEGIS untuk:

- 1) Membuka isolasi sebagai penyebab keterpencilan/ketertinggalan Kabupaten Kepulauan Sangihe (*outward looking/inward looking*);
- 2) Memposisikan kawasan perbatasan Kepulauan Sangihe yang selama ini sebagai daerah pinggiran dan terkebelakang, menjadi "Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia";
- 3) Memperkuat aksesibilitas Masyarakat dan Pemerintah Daerah guna mengantisipasi peluang-peluang kerja sama Bidang Ekonomi baik Nasional, Regional maupun Internasional memasuki era pasar bebas, dan berbagai aspek
- 4) yang bertalian dengan dinamika globalisasi;
- 5) Merangkai dinamika Kepulauan Sangihe agar boleh terintegrasi dan bersinergi ke dalam dinamika sistem mata rantai pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Utara maupun dalam konsep Pembangunan secara Nasional;
- 6) Meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa masuk dan keluar Daerah;
- 7) Mendukung dan mempermudah penyelenggaraan tugas-tugas TNI/POLRI dalam rangka pengendalian keamanan dan ketertiban daerah perbatasan yang pada gilirannya menjaga stabilitas keamanan nasional; dan
- 8) Membantu memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi di daerah ini masih belum memadai. Sarana telekomunikasi sebagian besar masih terfokus pada pulau yang daratannya sangat luas, seperti Pulau Sangihe, Pulau Siau dan Pulau Tagulandang. Untuk kecamatan dan pulau-pulau kecil lainnya yang sulit dijangkau dengan jaringan telepon, saat ini sedang diusahakan pembangunannya walaupun terbatas hanya pada sistim Satelit atau VSAT. Piranti telekomunikasi yang dominan dipakai oleh kawasan atau wilayah yang sulit dijangkau saat ini masih mengandalkan piranti komunikasi yang dimiliki oleh Pemerintah daerah yang digunakan di kantor kecamatan, PLN atau Radio *HandyTalky* para Amatir Radio.

Peran Pihak Swasta juga turut membantu keberadaan akan kebutuhan sarana Telekomunikasi di daerah ini, yakni pada Tahun 2003 sampai Akhir Tahun 2005 sudah dibangun beberapa Unit Stasiun Transmisi Telepon Seluler SATELINDO (Mentari) dan TELKOMSEL (Sempati) di Pulau Sangihe (4 stasiun) Siau (2 Stasiun), Tagulandang (2 Stasiun), dan Tamako (2 Stasiun). Guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan sarana telekomunikasi ini, saat ini Pihak Satelindo dan Telkomsel akan mengembangkan stasiun pada wilayah atau pulau-pulau yang belum terjangkau dengan sarana telekomunikasi tersebut.

Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman di Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih difokuskan pada pemenuhan rumah sederhana sehat bagi masyarakat berpendapatan rendah. Namun kedepan dengan adanya perkembangan kota yang diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk maka pengembangan kawasan perumahan dan permukiman melalui penciptaan lokasi-lokasi permukiman khususnya di daerah perkotaan. Disamping itu kendala lain yang dihadapi adalah terjadinya kesenjangan (*mismatch*) dalam pembiayaan perumahan disebabkan belum adanya sumber pembiayaan perumahan jangka panjang. Saat ini pembiayaan penyediaan perumahan dan permukiman di daerah ini masih tergantung pada peran pemerintah.

Di sektor ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah juga menghadapi kendala yang sampai saat ini masih terus mengemuka karena konfigurasi geografis yang terdiri dari 112 pulau besar/kecil dengan persebaran penduduk yang timpang (terjadi penumpukan jumlah penduduk terutama di Pulau Sangihe, Siau dan Tagulandang). Walaupun potensi cadangan energi primer cukup besar, pengembangan sistem kelistrikan yang optimal masih mengalami kesulitan karena lokasi-lokasi distribusi jauh/terpisah dari pusat beban (wilayah kepulauan). Di samping itu infrastruktur pendukung yang

lemah serta kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masih sangat minim. Sementara itu budaya usaha di bidang kelistrikan belum berkembang. Pertumbuhan kebutuhan masyarakat terhadap tenaga listrik cenderung meningkat secara signifikan setiap tahun tetapi pada sisi yang lain daya beli masyarakat masih rendah dan tidak merata. Regulasi investasi yang belum tertata dengan baik, citra politis, instabilitas ekonomi dan moneter sangat mempengaruhi minat swasta untuk berinvestasi di bidang kelistrikan.

Proyeksi Peluang.

Secara umum terbukanya peluang pengembangan di bidang infrastruktur dimungkinkan karena adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Indonesia untuk memacu Perkembangan Kawasan Perbatasan guna memperkecil kesenjangan antar wilayah sekaligus memberikan jaminan keamanan demi tegaknya kedaulatan NKRI serta kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam hal perencanaan dan penataan ruang kawasan Perbatasan.

Sebagai kawasan pintu gerbang bagian utara di wilayah Indonesia maka pengembangan transportasi perhubungan laut merupakan bagian yang perlu diperhitungkan dalam pengembangannya. Hal ini dikaitkan dengan peluang pengembangan kerja sama antara kawasan di Asia Pasifik di masa mendatang, yakni dengan mempersiapkan dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi laut.

Pada sub bidang transportasi udara pengembangan bandar udara Naha sebagai *Outward Looking* (pelabuhan transit bagi penumpang dan barang yang masuk dan keluar negeri), dengan strategisnya posisi daerah ini sebagai perbatasan tentunya menjadi pintu gerbang lalu lintas manusia dan barang yang masuk dan keluar negeri.

Peluang pengembangan pada sektor Perumahan dan Permukiman lebih banyak dimungkinkan dengan kebijakan pemerintah untuk memajukan daerah perbatasan dengan pemberian bantuan program perumahan daerah perbatasan.

Pada sektor kelistrikan, peluang pengembangan teknologi sumber daya alternatif berupa pembangkit listrik tenaga angin, solar cell memungkinkan untuk dikembangkan di daerah ini karena ditunjang dengan kondisi cuaca dan iklim serta topografi wilayah kepulauan dan berbukit.

Proyeksi Ancaman.

Adanya kerjasama regional dan interregional diberbagai aspek menuntut ketersediaan akan infrastruktur yang lengkap dan modern seperti jaringan jalan yang menjangkau keseluruhan wilayah, dermaga peti kemas, fasilitas bandara dan jaringan telekomunikasi yang modern serta ketersediaan akan sumberdaya energi kelistrikan.

Adanya ancaman akibat minimnya aksesibilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung berkiblat aktifitas sosial ekonominya kenegara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat yang tinggal diperbatasan.

Dalam hal pemenuhan akan ketersediaan air, ancaman yang dihadapi adalah menurunnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penggunaan sumber alam yang ada seperti; kegiatan pertambangan galian bahan bangunan yang tidak terkontrol, pengelolaan dan pemanfaatan sumber air baku yang berlebihan, dll. Dalam bidang kelistrikan ancaman yang dihadapi yaitu ketergantungan akan sumber daya energi diesel, yang diperkirakan untuk beberapa tahun kedepan tidak lagi ekonomis akibat adanya kecenderungan kenaikan harga BBM yang secara langsung mempengaruhi biaya operasionalnya.

Proyeksi Permasalahan

Masalah pokok yang akan menghambat peningkatan infrastruktur di daerah ini adalah ketersediaan dukungan dana.

Khusus untuk pengembangan infrastruktur sumberdaya air, masalah yang dihadapi adalah kerusakan lingkungan (hutan) yang semakin meluas dan berdampak pada keberlangsungan daya dukung sumber daya air. Masalah lain yang mungkin akan muncul adalah permintaan kebutuhan pelayanan (barang, jasa, manusia) yang tidak diimbangi dengan pengembangan/peningkatan infrastruktur perhubungan, perumahan, kelistrikan dan telekomunikasi.

Proyeksi Keberhasilan

Bertolak dari peluang, ancaman dan permasalahan di atas maka pada 20 tahun kedepan diharapkan gambaran peningkatan infrastruktur sumberdaya air dapat diwujudkan dengan berkurangnya jaringan irigasi yang tidak berfungsi, bertambahnya tanggul pengaman pantai, berkurangnya wilayah rawan banjir dan longsor, berfungsinya institusi Sumber Daya Air secara profesional, tersedianya air Baku/Air Bersih di pulau-pulau kecil terpencil, terealisasinya pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber air lainnya, terealisasinya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya serta terealisasinya pengendalian banjir dan pengaman pantai. Demikian juga untuk infrastruktur transportasi dan telekomunikasi diharapkan mengalami kemajuan, yaitu untuk Transportasi darat: bertambahnya ruas panjang jalan yang beraspal dan jembatan Nasional, sarana prasarana keselamatan pengguna jalan yang semakin memadai yang disesuaikan dengan kondisi dan keberadaan wilayah, rampungnya jalan lingkar pulau (Sangihe, Siau dan Pulau Tagulandang), meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan arteri primer untuk menanggulangi kemacetan, peningkatan pembangunan jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten serta penanganan jalan pada wilayah pedesaan, wilayah terisolasi dan pulau-pulau kecil serta meningkatnya jumlah pelabuhan penyebrangan ferry. Transportasi laut: meningkatnya jasa transportasi laut pulau kecil dan pusatpusat pemasaran, meningkatnya kinerja dan efisiensi pelabuhan, meningkatnya jumlah dermaga pada beberapa pulau atau Ibukota kecamatan lainnya, bertambahnya fasilitas pendukung pelabuhan (Lahan Parkir, Ruang Tunggu, Panjang Dermaga, Gudang, Karantina dll) yang dilengkapi dengan sarana bantu navigasi pelayaran, tersedianya angkutan pelayaran yang dikelola oleh pihak Pemerintah Daerah. Transportasi udara: meningkatnya/bertambahnya fasilitas bandara yang didukung dengan kualitas pelayanan yang profesional (ketertiban, keamanan, kelayakan dan keselamatan).

Perumahan dan permukiman : terpenuhinya kebutuhan hunian bagi masyarakat melalui terciptanya pasar primer yang sehat, efisien, akuntabel, tidak diskriminatif, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang didukung oleh sistim pembiayaan perumahan jangka panjang yang *market friendly*, efisien, dan akuntabel. Telekomunikasi dan Kelistrikan: diharapkan semua wilayah di daerah ini sudah terjangkau dengan jaringan telekomunikasi dan fasilitas kelistrikan.

2.1.6. Pemerintahan

Salah satu agenda penting dalam pembangunan pemerintahan adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Aspek-aspek penting yang berkaitan dengan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, penegakan supremasi hukum dan peningkatan peluang partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, berbagai langkah kebijakan terarah pada perubahan kelembagaan dan sistim pengawasan serta pemeriksaan yang efektif sangat diperlukan.

Otonomi daerah, sebagai salah satu dari sejumlah kebijakan strategis Pemerintah untuk menjawab berbagai tuntutan reformasi, telah mengubah penyelenggaraan pemerintahan dari pola pemerintahan bersifat sentralistik menjadi pola terdesentralisasi. Melalui kebijakan ini, pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diharapkan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini sangat dibutuhkan tidak saja untuk menghadapi berbagai tuntutan perkembangan di era yang semakin kompetitif ini, tetapi juga untuk mengentaskan sisa-sisa permasalahan yang terjadi pada waktu-waktu lalu yang hingga kini masih terus diupayakan penanggulangannya. Berbagai permasalahan warisan masa-masa sebelumnya berkembang dan meningkat derajat kompleksitasnya disebabkan telah terjadi perubahan-perubahan besar terutama yang

terkait dengan DESENTRALISASI, DEMOKRATISASI, GLOBALISASI dan REVOLUSI TEKNOLOGI INFORMASI.

Proyeksi permasalahan

Sejak diterapkannya kebijakan ini dalam pembangunan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, berbagai penataan kelembagaan secara intensif telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai tanggapan terhadap pembentukan daerah otonom baru dan tuntutan perkembangan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun demikian, birokrasi belum mengalami perubahan mendasar dan masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan. Permasalahan-permasalahan yang sedemikian kompleks makin menuntut kesiapan aparatur untuk menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat dan pelayanan yang berkualitas. Beberapa dari sejumlah permasalahan itu antara lain; (i) reformasi birokrasi belum sepenuhnya menjawab tuntutan masyarakat, (ii) masih ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang belum jelas, (iii) kerjasama antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan negara tetangga masih rendah, (iv) penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah belum efektif dan efisien, (v) kapasitas aparatur pemerintah daerah masih terbatas dan tergolong rendah, (vi) kapasitas keuangan pemerintah daerah masih terbatas, (vii) pemekaran wilayah belum sepenuhnya menjawab berbagai permasalahan mendasar (viii) konsep pembangunan wilayah kepulauan masih bersifat kontinental dan cenderung *inward looking*. Berbagai upaya akan diarahkan pada pemecahan permasalahan-permasalahan ini dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

Reformasi birokrasi yang belum berjalan sebagaimana diharapkan

diduga terkait erat dengan kompleksitas permasalahan yang sedang dihadapi seperti tingkat penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN yang masih tetap berlangsung dan pengawasan terhadap kinerja birokrasi yang masih lemah. Permasalahan-permasalahan ini belum sepenuhnya dapat diatasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri masih merupakan masalah kompleks yang membutuhkan upaya pemecahan secara bertahap dan terarah dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak ini terkait dengan meningkatnya tuntutan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik, ketaatan hukum dan pelimpahan tanggung jawab, serta tingginya tuntutan pelimpahan kewenangan dan pengambilan keputusan. Secara internal, berbagai permasalahan yang sedang dihadapi adalah pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan, praktek KKN, rendahnya kinerja SDM dan kelembagaan aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan belum memadai, efisiensi dan efektifitas kerja yang masih rendah, kualitas pelayanan umum belum optimal dan banyak peraturan yang tidak lagi relevan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan. Sementara faktor eksternal seperti globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga turut memberikan dampak signifikan terhadap upaya-upaya pencarian kebijakan-kebijakan alternatif untuk pemecahan berbagai masalah ini.

Cakupan wilayah pemerintahan yang luas apalagi di Kabupaten

Kepulauan Sangihe yang terdiri dari ratusan pulau menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak efektif yang berakibat pada ketertinggalan wilayah ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Sulawesi Utara.

Masih banyak kewenangan daerah yang belum didesentralisasikan

karena peraturan dan perundangan sektoral yang belum disesuaikan dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memicu berbagai permasalahan seperti dalam hal kewenangan, pengelolaan APBD, pengelolaan suatu kawasan atau pelayanan tertentu, pengaturan pembagian hasil sumber daya alam dan pajak dll. Selain itu adalah tumpang tindih kewenangan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang mengakibatkan berbagai konflik antara berbagai pihak dalam penerapan berbagai aturan.

Kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama pemerintah

daerah dengan negara tetangga masih tergolong rendah terutama dalam penyediaan pelayanan masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan daerah, pemanfaatan sumber daya secara bersama, kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, perikanan, perkebunan dan perikanan termasuk dalam pengelolaan pasca panen dll.

Umumnya struktur organisasi pemerintah daerah masih besar dan

tumpang tindih. Di samping itu, prasarana dan sarana pemerintahan masih minim dan belum ada standar pelayanan minimum. Hubungan kerja antar lembaga seperti pemerintah daerah, DPR, masyarakat dan organisasi non pemerintah belum optimal.

Sumber daya dan kapasitas aparatur pemerintah daerah masih

terbatas. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan aparatur pemerintah daerah dari segi jumlah maupun profesionalisme, terbatasnya kesejahteraan aparat pemerintah daerah serta tidak proporsionalnya distribusi yang menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak optimal yang ditandai dengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak ada kepastian waktu, tidak transparan dan kurang responsif terhadap permasalahan pembangunan di daerah. Di samping itu sistem dan regulasi yang memadai dalam perekrutan dan pola karir aparatur pemerintah daerah.

Kapasitas keuangan daerah masih terbatas yang ditandai dengan

terbatasnya efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah, belum efisiensinya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional serta terbatasnya kemampuan pengelolaan termasuk dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta profesionalisme.

Proyeksi Peluang

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan mendasar pola manajemen pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terutama terkait dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Landasan legal formal ini merupakan manifestasi semangat reformasi yang telah menjadi konsensus dan komitmen nasional untuk diimplementasikan baik oleh suprastruktur maupun infrastruktur politik dalam satu kesatuan visi, interpretasi dan persepsi.

Kebijakan Nasional berupa desentralisasi dan otonomi daerah yang berimplikasi kepada pemekaran provinsi, kabupaten dan kota telah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat di Daerah guna mempercepat Pembangunan Daerah. Di samping itu kondisi sosial dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia mempunyai kecenderungan akan bergerak ke arah yang lebih baik/maju. Indikator ini tercermin antara lain melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), relatif terkendalinya pengangguran, meningkatnya akses infrastruktur terutama transportasi dan telekomunikasi, pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, peningkatan kondisi sosial dan ekonomi tersebut relatif tidak merata serta sangat bervariasi antara satu Daerah dengan Daerah yang lain termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam hubungan ini ke depan perlu pula dipertimbangkan kemungkinan pemekaran Kabupaten Tagulandang-Biaro dan kota Tahuna. Strategi dan kebijakan ini tak lain bertujuan mempermudah/menyederhanakan Manajemen Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat umum sampai ke pelosok dan kepulauan/pesisir yang terpencil.

Proyeksi Ancaman

Pemekaran wilayah di satu sisi memang menghasilkan layanan sosial yang lebih efisien, tetapi di sisi lain membuka peluang menguatnya semangat primordialisme. Hal ini antara lain terlihat dari reaksi-reaksi penolakan dari satu kelompok terhadap kelompok etnis lainnya dalam berbagai wacana publik dengan alasan yang mengarah pada proses penguatan semangat sedemikian. Selain itu, batas wilayah

menjadi salah satu potensi konflik disamping berkurangnya luas wilayah juga berarti pengurangan potensi sumber daya alam secara signifikan.

Proyeksi Keberhasilan

Adanya ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang tergolong rendah, kelembagaan pemerintah daerah yang belum tertata baik, ketersediaan dan kualitas aparatur pemerintah daerah yang amat terbatas, kapasitas maupun pengelolaan keuangan daerah yang tergolong rendah dan daerah otonom yang belum tertata baik diperkirakan akan terus menuntut upaya-upaya revitalisasi proses desentralisasi/otonomi daerah dan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam pembangunan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe 20 tahun ke depan.

Pemekaran wilayah dengan segala konsekwensinya merupakan salah satu masalah mendasar yang akan dihadapi. Di samping dampak strategis seperti jangkauan dan kualitas pelayanan publik yang diperkirakan akan membaik dengan adanya pemekaran wilayah, berbagai hal berdampak tidak menguntungkan bagi wilayah induk maupun wilayah yang dimekarkan seperti batas wilayah dan pemahaman primordialisme semu diperkirakan akan menjadi tantangan serius bagi pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, upaya pemekaran wilayah diperkirakan tidak akan efektif jika semata-mata hanya didasarkan pada aspek politik. Itulah sebabnya, terkait dengan pemekaran wilayah upaya yang lebih konkrit dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kepulauan Sangihe harus lebih diutamakan dari aspek-aspek lainnya.

Globalisasi dan revolusi teknologi (*e-government*) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Hal ini terkait dengan meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor politik, ekonomi dan sosial, arus informasi yang makin deras yang berpeluang menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat. Perubahan-perubahan ini membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan terobosan dalam menghadapi berbagai tuntutan perubahan.

2.1.7. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) merupakan upaya strategis untuk pembentukan iklim inovasi yang dapat menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumber daya manusia yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Di samping itu, peningkatan kemampuan iptek juga sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan dan kemandirian serta daya saing karena untuk tumbuh dan berkembang di era globalisasi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) guna menunjang terciptanya landasan yang kuat bagi terwujudnya kemajuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, merupakan salah satu syarat mutlak. Hingga saat ini penguasaan Iptek masih tergolong sangat rendah. Itulah sebabnya, pembangunan Iptek masih memerlukan perhatian dari berbagai pihak sehingga penguasaan berbagai aspek terkait dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ini benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mendukung perumusan kebijakan dan langkah-langkah pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Proyeksi Permasalahan

Kemampuan Iptek Daerah Masih Rendah. Kemampuan menyerap ilmu

pengetahuan dan Teknologi (Iptek) belum dapat diandalkan. Faktor kualitas SDM serta faktor-faktor pendukung lainnya seperti ketidaktersediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti perguruan tinggi negeri dan lembaga penelitian dan pengembangan sangat mempengaruhi pengembangan IPTEK di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Kontribusi Iptek Daerah Masih Sangat Rendah. Sejumlah penelitian

yang telah dilakukan selang 2001-2003 sebagai hasil kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan lembaga-lembaga penelitian di tingkat provinsi masih terfragmentasi dan belum disertai dengan kajian pasar secara matang sehingga sangat sulit ditindaklanjuti dalam bentuk pengembangan produk atau jasa yang berdaya saing. Sinergi Kebijakan Iptek Masih Lemah sehingga kegiatan Iptek belum sanggup memberikan hasil signifikan. Kebijakan-kebijakan pendidikan dan Iptek belum terintegrasi sehingga kapasitas

Kemampuan Iptek Belum Dapat Diandalkan untuk mengantisipasi dan

menanggulangi bencana, degradasi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam Secara Berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan wilayah yang rawan bencana, namun belum ada kontribusi iptek daerah belum optimal dalam memberikan antisipasi dan solusi strategis terhadap berbagai permasalahan terkait bencana alam seperti pemanasan global, banjir, longsor, gempa bumi dan tsunami. Hal ini juga berlaku pada upaya antisipasi dan penanggulangan degradasi lingkungan, pemecahan masalah terkait dengan penguasaan informasi, kesehatan maupun eksplorasi serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Proyeksi Ancaman

Derasnya arus globalisasi membawa perubahan paradigma yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Globalisasi telah menyebabkan terjadinya REVOLUSI TEKNOLOGI dan INFORMASI yang akan mempengaruhi aktivitas dan perilaku di bidang aparatur negara. Selain itu, kemajuan Iptek juga dapat mengakibatkan munculnya permasalahan lingkungan. Hal ini dikarenakan oleh sistem manajemen dan teknologi pelestarian lingkungan belum berkembang.

Proyeksi Peluang

Revolusi teknologi dan informasi akan mempengaruhi manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk *E-Government*, *E-Business*, dan *Cyber Law* selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah, juga akan meningkatkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Itulah sebabnya, pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk menciptakan jaringan informasi yang interaktif antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan masyarakat dalam bentuk *E-government*, *E-learning*, *E-Procurement*, *E-Business* dan *CyberLaw* untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah akan diprioritaskan penataannya dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

Pengembangan Iptek memiliki peran penting antara lain dalam; (a) mendorong pengembangan manusia berkualifikasi tinggi, berakhlak mulai, penuh pengabdian kepada bangsa dan negara, (b) mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan (c) melestarikan lingkungan, sumber daya dan budaya daerah, (d) mendukung upaya pemecahan berbagai permasalahan terkait dengan pengembangan dan pembangunan daerah.

Proyeksi Keberhasilan

Dalam dimensi 20 tahun ke depan upaya penyerapan, penguasaan dan pemanfaatan IPTEK harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan implementasi program-program pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe karena untuk dapat menghasilkan produk-produk (barang dan jasa) yang mempunyai daya saing tinggi, kemampuan dan kemandirian di era globalisasi merupakan kebutuhan mutlak.

Daya saing tinggi antara lain sangat dipengaruhi oleh tingkat produktifitas yang tinggi dan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produktifitas adalah penerapan teknologi tepat guna, sumber daya manusia profesional, infrastruktur yang memadai dan iklim usaha yang kondusif. Itulah sebabnya, dalam penerapan Iptek di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktifitas tinggi yang dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan guna mendorong kreatifitas, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka percepatan pembangunan daerah yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai. Selain itu, penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan penerapan sistem MSTQ sudah harus diupayakan semaksimal mungkin. Kerjasama dengan perguruan tinggi, institusi lokal,

nasional dan internasional akan mulai diintensifkan. Penguasaan Iptek akan diarahkan pada peningkatan usaha-usaha pemberdayaan masyarakat dalam penguasaan teknologi dengan prioritas pada teknologi tepat guna bagi pedesaan, rumah tangga dan agroindustri dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

2.2. PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

2.2.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Mengacu pada proyeksi peluang, ancaman dan permasalahan di bidang geomorfologi dan lingkungan hidup, pencapaian keberhasilan pembangunan akan ditempuh melalui sejumlah tahapan kebijakan berikut:

Tahun 2005-2010

1. Menerapkan sistim pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, koordinasi dan penguatan kelembagaan serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum;
2. Membangun sistim pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya laut;
3. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang rusak;
4. Memperkuat kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan seperti iptek, SDM, Kelembagaan dan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir serta mengurangi resiko terhadap bencana alam;
6. Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan;
7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan;
8. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten;
9. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten;
10. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
11. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
12. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana serta informasi kewaspadaan dini; dan
13. Mengupayakan pembentukan badan khusus yang akan menangani masalah bencana alam.

Tahun 2010-2015

1. Melanjutkan upaya pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum;
2. Melanjutkan penerapan sistim pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya laut disertai dengan penegakan hukum;
3. Melanjutkan upaya konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun dan estuari;

4. Menyempurnakan upaya penguatan kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan yang meliputi iptek, SDM, Kelembagaan dan peraturan perundang-undangan;
5. Memantapkan upaya penerapan mitigasi lingkungan laut dan pesisir serta mengurangi resiko terhadap bencana alam;
6. Menuntaskan upaya pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan;
7. Memantapkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten;
8. Menyempurnakan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakan hukum secara konsisten;
9. Melanjutkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
10. Memperkuat kesadaran masyarakat agar peduli terhadap pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulatif, terkait fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana;
11. Memantapkan penyebaran data dan informasi lingkungan termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana dan informasi kewaspadaan dini; dan
12. Memantapkan upaya pembentukan badan khusus yang akan menangani masalah bencana.

Tahun 2015-2020

1. Memantapkan upaya pengelolaan hutan, koordinasi dan penguatan kelembagaan serta pengawasan dan penegakan hukum;
2. Menyempurnakan penerapan sistim pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya laut;
3. Memantapkan upaya konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem;
4. Menyempurnakan upaya penguatan kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan seperti meliputi iptek, SDM, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan;
5. Menyempurnakan upaya penerapan mitigasi lingkungan laut dan pesisir;
6. Memantapkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan;
7. Memantapkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten;
8. Menuntaskan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakan hukum secara konsisten;
9. Memantapkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
10. 10. Memantapkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup;
11. Menuntaskan penyebaran data dan informasi lingkungan termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana dan informasi kewaspadaan dini; dan
12. Menuntaskan upaya pembentukan badan khusus yang menangani masalah bencana.

Tahun 2020-2025

1. Menyempurnakan upaya pengelolaan hutan, koordinasi dan penguatan kelembagaan serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum;

2. Menyempurnakan penerapan sistim pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya laut;
3. Menyempurnakan upaya konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak;
4. Menuntaskan upaya penguatan kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan seperti iptek, SDM, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan;
5. Memantapkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan;
6. Memantapkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten;
7. Menuntaskan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakan hukum secara konsisten;
8. Memantapkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
9. Memantapkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup; dan
10. Menuntaskan penyebaran data dan informasi lingkungan termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana dan informasi kewaspadaan dini.

2.2.2 Demografi

Dalam 20 tahun ke depan pengendalian kualitas dan laju pertumbuhan penduduk tetap harus dikendalikan agar terjadi keseimbangan sehingga Bonus Demografi yang ditandai dengan penduduk usia produktif lebih besar jumlahnya dari pada penduduk non produktif, disamping itu masih tingginya kasus kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, serta tingginya proporsi balita kurang gizi. Oleh karena itu bidang pendidikan, kesehatan dan pembukaan lapangan kerja serta pemberdayaan perempuan harus menjadi prioritas.

Jumlah penduduk yang terus meningkat memerlukan sumberdaya yang tidak sedikit untuk menunjang kehidupannya dan akan menjadi beban daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pembangunan kondisi penduduk seperti kuantitas penduduk, kualitas penduduk, distribusi/persebaran penduduk dan angka kemiskinan merupakan faktor yang mempengaruhi.

Keadaan demografi kabupaten kepulauan Sangihe pada kurun waktu 20 tahun (2005-2025) ke depan adalah:

1. Pendidikan yang Meningkat. Penduduk yang berpendidikan tinggi dan sehat akan membentuk sumberdaya manusia yang makin produktif. Tantangannya adalah menciptakan lapangan kerja yang memadai, sebab jika angka pengangguran tinggi akan terjadi implikasi sosial.
2. Peningkatan Derajat Kesehatan. Usia Harapan Hidup (AHH) meningkat dan jumlah penduduk usia lanjut besar, menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IMP) dan tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dimana *Total Fertility Rate* (TFR) sama dengan 2,1 per-Wanita Usia Subur (WUS). Tantangannya adalah bagaimana Mencapai PTS yang ditandai dengan TFR yang ideal, bagaimana memanfaatkan penduduk lanjut usia yang potensial dengan pengetahuan tinggi dan berpengalaman.
3. Pergeseran Usia. Transisi umur dari penduduk muda ke penduduk tua (*ageing proses*) akan membawa konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan dan kesempatan kerja sehingga akan terjadi apa yang disebut beban ketergantungan karena penyantunan terhadap usia lanjut, juga akan berpengaruh pada perubahan sosial ekonomi.
4. Jumlah Penduduk Perkotaan Semakin Meningkat. Penataan dan persebaran penduduk secara seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan pemerataan pembangunan. Peningkatan status sosial ekonomi masyarakat telah menyebabkan persentase penduduk yang

tinggal diperkotaan meningkat. Pertumbuhan perkotaan akan sejalan dengan pertumbuhan penduduk, sehingga tuntutan fasilitas perkotaan akan bertambah. Bertambahnya penduduk perkotaan akan juga berpengaruh terhadap keadaan perkembangan fisik kota, peningkatan sarana perhubungan dan komunitas termasuk di pedesaan.

5. Perubahan angka kelahiran dan kematian yang berpengaruh terhadap struktur penduduk. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana yang bermutu dan efektif, merata dan terjangkau dalam konteks pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas.
6. Peningkatan intensitas mobilitas. Mobilitas penduduk yang relatif tinggi membutuhkan jaringan sarana dan prasarana yang makin baik dan luas serta memberikan dampak pada pergeseran norma-norma masyarakat.
7. Tingginya pertumbuhan angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja yang relatif tinggi disatu pihak menuntut pembinaan angkatan kerja agar mampu menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat global.
8. Perubahan Lapangan Kerja. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, lapangan pekerjaan penduduk berubah.

Dalam perkembangan kedepan perhatian terhadap kependudukan semakin luas dan terkait dengan berbagai dimensi kehidupan penduduk dalam kawasan dan antarkawasan. Salah satunya adalah kualitas penduduk yang berkaitan dengan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bukan hanya demografis tetapi semakin komprehensif.

Dengan kondisi demografi kabupaten kepulauan Sangihe prediksi kondisi daerah pada 20 tahun (2005-2025) mendatang adalah:

Tahun 2005-2010

1. Peningkatan pendidikan penduduk kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dengan menciptakan satuan-satuan pendidikan non-formal terutama berkaitan dengan pendidikan penduduk yang berkualitas rendah;
2. Penataan persebaran penduduk yang seimbang di tiap wilayah berdasarkan klaster;
3. Terciptanya lapangan pekerjaan formal dan non formal yang seluas-luasnya, terutama menuju kearah industri padat karya, menengah dan berorientasi ekspor;
4. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, melalui peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk kesehatan reproduksi remaja dan pelayanan Keluarga Berencana;
5. Menurunnya jumlah penduduk miskin rata-rata 8,10 % per-tahun.
6. Penyempurnaan berbagai program yang berkaitan dengan migrasi internal penduduk karena kurangnya kesempatan kerja dalam daerah; dan
7. Terciptanya fleksibilitas pasar kerja yang berkaitan dengan rekrutmen dan pengupahan.

Tahun 2010-2015.

1. Terwujudnya penduduk yang sehat 2010 sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan.
2. Tercapainya pengendalian mobilitas penduduk yang berkaitan dengan tenaga kerja.
3. Tersedianya infrastruktur untuk pelayanan pendidikan dan kesempatan kerja tiap klaster.
4. Meningkatkan status sosial masyarakat/kesejahteraan masyarakat.

5. Bergesernya norma-norma kehidupan masyarakat ke arah yang berkualitas.

Tahun 2015-2020

1. Terwujudnya penduduk dan keluarga kecil berkualitas.
2. Meningkatnya kualitas masyarakat (kualitas kesehatan, gizi, penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan).
3. Terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan perkotaan dengan pertumbuhan penduduk.
4. Terciptanya keseimbangan jumlah penduduk dan lapangan kerja.
5. Meningkatnya pelayanan reproduksi/keluarga berencana yang bermutu dan efektif.

Tahun 2020-2025

1. Meningkatnya Angka Harapan Hidup dan penduduk usia lanjut.
2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.
3. Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS).
4. Terwujudnya persebaran penduduk yang merata disetiap wilayah klaster.
5. Meningkatnya pembinaan angkatan kerja dan pemberdayaan masyarakat
6. Terbukanya lapangan kerja bagi penduduk usia kerja

2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Berdasarkan permasalahan, peluang dan ancaman, keberhasilan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam 20 tahun ke depan diproyeksikan dapat dicapai melalui penerapan sejumlah kebijakan berikut ini:

Tahun 2005-2010

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 6,67% dan produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita sebesar Rp. 6.516.399;
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah;
3. Pengembangan UKM dan Koperasi;
4. Peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah;
5. Perbaikan pengelolaan sumber keuangan daerah;
6. Pengembangan kelembagaan ekonomi sesuai dinamika kemajuan ekonomi dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif serta non diskriminatif;
7. Mengarahkan kebijakan dan strategi pengembangan industri daerah yang lebih terfokus dan rinci dengan memperhatikan strategi pengembangan subsektor industri terkait dan subsektor industri penunjang pada industri-industri unggulan daerah yang berdimensi jangka menengah dan panjang dengan melibatkan seluruh pihak terkait untuk berpartisipasi dalam perumusannya;
8. Pengembangan perdagangan dan industri dengan mengutamakan
9. pengembangan industri daerah berbasis sumber daya lokal yang dapat menyerap tenaga kerja

dalam jumlah relatif besar seperti pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata dan sumber daya alam lainnya yang memiliki potensi pengembangan ekspor;

10. Mengarahkan pengembangan industri daerah berorientasi nilai tambah seperti industri produk turunan kelapa, industri produk turunan ikan tuna dan cakalang, industri produk turunan rumput laut dan industri kerajinan rakyat;
11. Mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dengan menggunakan teknik seperti pola terasering dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan;
12. Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis (agropolitan);
13. Penyusunan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dalam bentuk dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan melindungi petani dari persaingan yang tidak sehat;
14. Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian termasuk melalui penyuluhan untuk mendukung pengembangan agroindustri;
15. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS;
16. Memanfaatkan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya secara optimal;
17. Pengembangan sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan tanah;
18. Peningkatan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat pesisir lainnya;
19. Pengembangan usaha perikanan tangkap secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan khususnya di wilayah pesisir hingga wilayah perairan sejauh 12 mil;
20. Percepatan pengembangan usaha perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan melalui pembangunan dan pengembangan iptek, prasarana dan sarana yang memadai;
21. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumberdaya perikanan dan kelautan serta pengembangan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan melalui pengembangan usaha, investasi dan pemasaran hasil laut dan ikan;
22. Peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan baik melalui pengembangan industri pengolahan skala industri rumah tangga dalam bentuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) dalam rangka memperkuat industri perikanan dan kelautan;
23. Perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi;
24. Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
25. Meningkatkan eksplorasi dalam upaya menemukan sumber daya alternatif;
26. Peningkatan pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat berdasarkan daya dukung lingkungannya;
27. Pengembangan sektor pariwisata yang meliputi pengembangan dan pengelolaan objek-objek wisata secara lebih profesional dengan menerapkan pembangunan pariwisata berkelanjutan,

bersinergi, dan terintegrasi sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah;

28. Pembenahan dan penguatan institusi-institusi pemerintah yang terkait langsung dengan pariwisata, penguatan sektor swasta yang berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan pariwisata serta penyusunan regulasi-regulasi yang mendukung pembangunan pariwisata;
29. Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup;
30. Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah;
31. Menciptakan kondisi daerah yang berdaya saing, memiliki nuansa yang proinvestasi dan bisnis, pro-lingkungan melalui penataan institusi, sistem dan prosedur yang transparan serta regulasi-regulasi investasi di daerah;
32. Menyusun dan menetapkan strategi pengembangan investasi daerah dan bentuk-bentuk kerjasama peningkatan investasi dalam jangka menengah dan jangka panjang;
33. Mendorong dan melibatkan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk secara langsung membantu dalam bentuk asset dan/atau modal serta mendukung pihak swasta dalam mengelola kegiatan-kegiatan investasi strategis bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
34. Mendorong pemerintah Pusat dan Provinsi untuk memfasilitasi dan membantu bisnis yang masih diperhadapkan dengan kendala-kendala internal dan eksternal seperti manajemen, teknologi, modal kerja, informasi, pemasaran, dan ketenagakerjaan;

Tahun 2010-2015

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0% dan produk domestik regional bruto (pdrb) perkapita sebesar Rp. 8.400.193;
2. Pengembangan perekonomian berbasis keunggulan komparatif;
3. Mengembangkan pola jaringan rumpun industri (*industrial cluster*) pada sektor industri kecil;
4. Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas dengan merangsang pertumbuhan aktifitas ekonomi lokal dalam bentuk diversifikasi usaha pertanian kearah komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi;
5. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian unggulan untuk meningkatkan kontinuitas pasokan khususnya ke pasar nasional dan internasional serta industri olahan berbasis sumberdaya lokal;
6. Melanjutkan pengembangan perdagangan dan industri dengan mengutamakan pengembangan industri daerah berbasis sumber daya lokal yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah relatif besar seperti pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata dan sumber daya alam lainnya yang memiliki potensi pengembangan ekspor;
7. Melanjutkan upaya pengembangan industri daerah berorientasi nilai tambah seperti industri produk turunan kelapa, industri produk turunan ikan tuna dan cakalang, industri produk turunan rumput laut dan industri kerajinan rakyat;
8. Melanjutkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan;
9. Melanjutkan upaya pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis (agropolitan);
10. Penerapan langkah-langkah peningkatan daya saing produk pertanian dalam bentuk dorongan dan

insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan melindungi petani dari persaingan yang tidak sehat;

11. Pemantapan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian dan mendukung pengembangan agroindustri;
12. Memantapkan pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS;
13. Memantapkan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya secara optimal;
14. Memantapkan sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan tanah;
15. Pemantapan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat pesisir lainnya;
16. Pengembangan usaha perikanan tangkap secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan khususnya di wilayah pesisir hingga wilayah perairan sejauh 12-200 mil;
17. Melanjutkan pengembangan usaha perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan melalui pembangunan dan pengembangan iptek, prasarana dan sarana yang memadai;
18. Pemantapan kapasitas kelembagaan pengelola sumberdaya perikanan dan kelautan serta pengembangan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan melalui pengembangan usaha, investasi dan pemasaran hasil laut dan ikan;
19. Penyempurnaan mutu dan nilai tambah hasil perikanan baik melalui pengembangan industri pengolahan skala industri rumah tangga dalam bentuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) dalam rangka memperkuat industri perikanan dan kelautan;
20. Penerapan kebijakan dan penyusunan peraturan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi;
21. Memantapkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
22. Menerapkan hasil eksplorasi dalam upaya menemukan sumber daya alternatif;
23. Pemantapan pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat berdasarkan daya dukung lingkungannya;
24. Memantapkan sektor pariwisata yang meliputi pengembangan dan pengelolaan objek-objek wisata secara lebih profesional dengan menerapkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, bersinergi, dan terintegrasi sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah;
25. Pemantapan institusi-institusi pemerintah yang terkait langsung dengan pariwisata, penguatan sektor swasta yang berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan pariwisata serta penyusunan regulasi-regulasi yang mendukung pembangunan pariwisata;
26. Menciptakan dan memantapkan kondisi daerah yang berdaya saing, memiliki nuansa yang pro-investasi dan bisnis, pro-lingkungan melalui penataan institusi, sistem dan prosedur yang transparan serta regulasi-regulasi investasi di daerah;
27. 27. Mendorong dan melibatkan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk secara langsung membantu dalam bentuk asset dan/atau modal serta mendukung pihak swasta dalam mengelola kegiatan-kegiatan investasi strategis bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
28. Mendorong pemerintah Pusat dan Provinsi untuk memfasilitasi dan membantu bisnis yang masih

diperhadapkan dengan kendala-kendala internal dan eksternal seperti manajemen, teknologi, modal kerja, informasi, pemasaran, dan ketenagakerjaan;

29. Memantapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;
30. Melanjutkan eksplorasi sumber daya alternatif;
31. Penerapan kebijakan dan peraturan pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi;
32. Memantapkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
33. Menerapkan strategi pengembangan investasi daerah dan bentuk-bentuk kerjasama peningkatan investasi dalam jangka menengah dan jangka panjang;
34. Memaksimalkan bantuan dan keterlibatan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam memberikan bantuan dalam bentuk asset dan/atau modal serta mendukung pihak swasta dalam mengelolah kegiatan-kegiatan investasi strategis bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangehe;
35. Memaksimalkan bantuan pemerintah Pusat dan Provinsi dalam memfasilitasi dan membantu bisnis yang masih diperhadapkan dengan kendala-kendala internal dan eksternal seperti manajemen, teknologi, modal kerja, informasi, pemasaran, dan ketenagakerjaan;
36. Memperkokoh struktur industri agro yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, serta memprioritaskan pengembangan industri pada aspek pendalaman (*deepening*) dengan memperluas pemanfaatan teknologi, peningkatan nilai pengganda (*multiplier*) pada masing-masing sub-sektor industri, pengamanan pasar dalam negeri/daerah dari produk-produk impor ilegal, menggalakan penggunaan bahan baku dan antara dari dalam negeri khususnya dari daerah, dan memantau dan mempelajari hambatan-hambatan *non-tariff barrier* (NTB) pada komoditi-komoditi unggulan ekspor daerah;
37. Mengarahkan intervensi pemerintah secara langsung dalam bentuk investasi dan pelayanan publik khususnya pada mekanisme pasar yang tidak dapat berfungsi seperti pengembangan penelitian dan pengembangan untuk pembaharuan dan inovasi teknologi produksi, pengembangan manajemen produksi memperhatikan kesinambungan lingkungan dan teknik produksi yang ramah lingkungan, peningkatan kompetensi dan ketrampilan tenaga kerja, layanan informasi pasar produk dan faktor produksi, pengembangan fasilitas untuk memanfaatkan aliran masuk sumber alih teknologi dan perluasan pasar ekspor, prasarana dan sarana pengendalian mutu dan pengembangan produk, dan prasarana pengembangan klaster.

Tahun 2015-2020

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 9,35% dan pendapatan perkapita sebesar Rp. 10.283.986;
2. Membuka lapangan kerja pada sektor ekonomi (khususnya industri kecil);
3. Menciptakan stabilitas ekonomi;
4. Pengembangan kelembagaan ekonomi sesuai dinamika kemajuan ekonomi dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif dan non diskriminatif;
5. Pengembangan sistim perekonomian dengan sektor industri berbasis sumber daya lokal sebagai motor penggerak utama;
6. Pemantapan pengelolaan sumber keuangan daerah;
7. Memantapkan pengembangan perdagangan dan industri dengan mengutamakan

pengembangan industri daerah berbasis sumber daya lokal yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah relatif besar seperti pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata dan sumber daya alam lainnya yang memiliki potensi pengembangan ekspor;

8. Memantapkan upaya pengembangan industri daerah berorientasi nilai tambah seperti industri produk turunan kelapa, industri produk turunan ikan tuna dan cakalang, industri produk turunan rumput laut dan industri kerajinan rakyat;
9. Memantapkan 5 praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan;
10. Memantapkan upaya pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis (agropolitan);
11. Penerapan langkah-langkah peningkatan daya saing produk pertanian dalam bentuk dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan melindungi petani dari persaingan yang tidak sehat;
12. Menyempumakan sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS;
13. Menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;
14. Memantapkan penerapan kebijakan dan peraturan pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi;
15. Memantapkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
16. Memantapkan kondisi daerah yang berdaya saing, memiliki nuansa yang proinvestasi dan bisnis, pro-lingkungan melalui penataan institusi, sistem dan prosedur yang transparan serta regulasi-regulasi investasi di daerah;
17. Memantapkan keterlibatan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk secara langsung membantu dalam bentuk asset dan/atau modal serta mendukung pihak swasta dalam mengelola kegiatan-kegiatan investasi strategis bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
18. Memaksimalkan bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam menangani bisnis yang masih diperhadapkan dengan kendala-kendala internal dan eksternal seperti manajemen, teknologi, modal kerja, informasi, pemasaran dan ketenagakerjaan;
19. Mengembangkan lokasi-lokasi yang layak secara ekonomi, lingkungan, dukungan infrastruktur, untuk dikembangkan menjadi *industrial estate*;
20. Menerapkan strategi pengembangan investasi daerah dan bentuk-bentuk kerjasama peningkatan investasi dalam jangka menengah dan jangka panjang;
21. Meningkatkan intervensi pemerintah secara langsung dalam bentuk investasi dan pelayanan publik khususnya pada mekanisme pasar yang tidak dapat berfungsi seperti pengembangan penelitian dan pengembangan untuk pembaharuan dan inovasi teknologi produksi, pengembangan manajemen produksi memperhatikan kesinambungan lingkungan dan teknik produksi yang ramah lingkungan, peningkatan kompetensi dan ketrampilan tenaga kerja, layanan informasi pasar produk dan faktor produksi, pengembangan fasilitas untuk memanfaatkan aliran masuk sumber alih teknologi dan perluasan pasar ekspor, prasarana dan sarana pengendalian mutu dan pengembangan produk, dan prasarana pengembangan klaster.

22. Pengembangan nilai tambah industri berbasis sumber daya alam. Sehubungan dengan peningkatan basis produksi, berbagai upaya perlu dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah sub-sub sektor industri berbasis sumber daya alam, pengembangan berbagai kegiatan produksi perikanan, dan perkebunan, dan tanaman pangan, mengembangkan basis produksi kegiatan non-pertanian *modern* di wilayah-wilayah pedesaan.

Tahun 2020-2025

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 11,0% dan pendapatan perkapita sebesar Rp. 12.167.779;
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis perikanan, pertanian, pertambangan, perdagangan dan industri serta pariwisata;
3. Terciptanya kesempatan kerja yang cukup besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan sektor unggulan lainnya;
4. Menurunnya laju angka inflasi sampai di bawah 2 digit angka;
5. Mantapnya kelembagaan ekonomi sesuai dinamika kemajuan ekonomi dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif dan non diskriminatif;
6. Terwujudnya perekonomian dengan sektor industri sebagai motor penggerak utama;
7. Mantapnya pengelolaan sumber keuangan daerah;
8. Menyempurnakan pengelolaan dan pendayagunaan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya di daratan yang terbarukan maupun tak terbarukan secara lestari berbasis masyarakat;
9. Mantapnya kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
10. Mantapnya daya saing produk pertanian dalam bentuk dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan melindungi petani dari persaingan yang tidak sehat;
11. Menyempurnakan sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS;
12. Terwujudnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;
13. Mengembangkan *industrial estate* menjadi kawasan berikat;
14. Terwujudnya kondisi daerah yang berdaya saing, bernuansa pro-investasi dan bisnis, pro-lingkungan melalui penataan institusi, sistem dan prosedur dan regulasi-regulasi investasi yang transparan di daerah;
15. Terwujudnya strategi pengembangan investasi daerah dan bentuk-bentuk kerjasama peningkatan investasi;
16. Mewujudkan kinerja daya saing daerah dan industri daerah berkelanjutan dengan memperkokoh landasan dan struktur ekonomi daerah yang kuat dengan menjaga stabilitas ekonomi daerah, mewujudkan kondisi wilayah yang aman, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang sehat dan berdaya saing serta pengelolaan persaingan usaha yang sehat;
17. Terwujudnya industri berbasis sumber daya alam. Sehubungan dengan peningkatan basis produksi,

berbagai upaya perlu dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah sub-sub sektor industri berbasis sumber daya alam, pengembangan berbagai kegiatan produksi perikanan, dan perkebunan, dan tanaman pangan, mengembangkan basis produksi kegiatan non-pertanian *modern* di wilayah-wilayah pedesaan.

2.1.5. Sosial Budaya dan Politik

Sejumlah kebijakan yang akan ditempuh dalam 20 tahun depan adalah sebagai berikut:

Tahun 2005-2010

1. Pengembangan pendidikan dasar dan menengah berbasis budaya, sumber daya lokal dan kebutuhan lokal;
2. Pembangunan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis potensi daerah;
3. Pengembangan fasilitas persekolahan;
4. Pengadaan tenaga guru/pengajar;
5. Revitalisasi institusi pendidikan;
6. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu di seluruh klaster Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan prioritas pada klaster tertinggal seperti Klaster Perbatasan, Klaster Tatoareng dan Klaster Biaro;
7. Meningkatkan perluasan, pemerataan, dan mutu pendidikan melalui jalur formal dan nonformal untuk umum maupun kejuruan;
8. Penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah dan kejuruan yang berkualitas dengan meningkatkan relevansinya dengan kebutuhan tenaga kerja;
9. Meningkatkan pemerataan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
10. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan beragama, agar terwujud sikap hidup yang bermoral, beretika, dan berpengamalan spiritual;
11. Meningkatkan kualitas SDM pendidik agama serta jumlah pendidik agama di segala jenjang lembaga pendidikan;
12. Meningkatnya wadah dan/atau forum dialog antar umat beragama di kalangan masyarakat;
13. Upaya promotif dan preventif, pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin daerah tertinggal dan daerah bencana;
14. Pengembangan kesehatan dan sanitasi lingkungan wilayah pulau-pulau kecil perbatasan.
15. Pengembangan dan pengadaan fasilitas puskesmas;
16. Peningkatan Status Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas
17. Pembangunan Rumah Sakit tipe D di Klaster Siau
18. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan (dokter, tenaga paramedis) terutama Klaster Biaro, Klaster Tatoareng dan Klaster Perbatasan;
19. Pembangunan sekolah keperawatan di Klaster Siau;
20. Terciptanya iklim politik yang kondusif;
21. Terselenggaranya PILKADA tahun 2006;

22. Mengoptimalkan peran BKSUA;
23. Meningkatkan upaya pelestarian berbagai kekayaan budaya;
24. Mengembangkan sistem informasi dan database bidang kebudayaan;
25. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola kekayaan budaya;
26. Meningkatkan pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya;
27. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
28. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan dan anak;
29. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
30. Menyempurnakan perangkat hukum pidana untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga;
31. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
32. Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk pemenuhan komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender.

Tahun 2010-2015

1. Penyediaan Sarana Pendidikan, Sekolah Menengah Tingkat Menengah, terutama di Klaster Biaro, Tatoareng dan Perbatasan;
2. Meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar kejenjang pendidikan yang lebih tinggi;
3. Meningkatkan status kesehatan masyarakat antar klaster;
4. Pengembangan pendidikan dasar dan menengah berbasis budaya, sumber daya lokal dan kebutuhan lokal;
5. Pengembangan fasilitas persekolahan;
6. Penerapan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun;
7. Melanjutkan upaya pemerataan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Memantapkan pembinaan agama pada tingkat keluarga dan sekolah;
9. Peningkatan Status RSUD Liukendaghe menjadi RSUD Tipe B;
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan (dokter, tenaga paramedis) di semua Klaster;
11. Pembangunan sekolah keperawatan di Klaster Tagulandang;
12. Terciptanya iklim politik yang kondusif.
13. Terselenggaranya PILKADA tahun 2011;
14. Melanjutkan upaya pelestarian berbagai kekayaan budaya;

15. Melanjutkan upaya pengembangan sistim informasi dan database bidang kebudayaan;
16. Memantapkan kapasitas SDM pengelola kekayaan budaya;
17. Melanjutkan upaya pelibatan peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Tahun 2015-2020

1. Penyediaan Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Tinggi terutama di Klaster Biaro, Tatoareng dan Perbatasan;
2. Melanjutkan peningkatan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar kejenjang pendidikan yang lebih tinggi;
3. Melanjutkan peningkatan status kesehatan masyarakat antar klaster;
4. Memantapkan Pengembangan fasilitas persekolahan;
5. Memantapkan Penerapan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun;
6. Pembangunan Rumah Sakit di Klaster Tagulandang dan Klaster Tatoareng.
7. Pembangunan Puskesmas di wilayah pulau kecil dan desa terpencil;
8. Terciptanya iklim politik yang kondusif;
9. Terselenggaranya PILKADA tahun 2016;
10. Memantapkan upaya pelastarian berbagai kekayaan budaya;
11. Menyempurnakan upaya pengembangan sistim informasi dan database bidang kebudayaan; dan
12. Semakin mantapnya peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya;
13. Memantapkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
14. Melanjutkan upaya peningkatan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan dan anak;
15. Menerapkan perangkat hukum pidana untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga;
16. Memantapkan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
17. Melanjutkan upaya penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk pemenuhan komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender.

Tahun 2020-2025

1. Tersedianya semua jenjang pendidikan di semua Klaster
2. Melanjutkan peningkatan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar kejenjang pendidikan yang lebih tinggi;
3. Membaiknya derajat kesehatan masyarakat di semua klaster;

4. Tersedianya fasilitas persekolahan yang memadai di semua klaster;
5. Tercapainya tujuan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun di semua klaster;
6. Pembangunan Rumah Sakit di Klaster Biaro dan Klaster Pulau Perbatasan;
7. Terbangunnya Puskesmas di seluruh desa;
8. Terciptanya iklim politik yang kondusif;
9. Terselenggaranya PILKADA tahun 2021;
10. Menyempurnakan upaya pelestarian berbagai kekayaan budaya;
11. Menyempurnakan pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan; dan
12. Mantapnya peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya;
13. Pemantapan upaya peningkatan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan dan anak;
14. Melanjutkan upaya penerapan hukum pidana untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga;
15. Memantapkan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
16. Menyempurnakan upaya penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk pemenuhan komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender.

2.1.6. Prasarana dan Sarana.

Kebijakan yang akan ditempuh dalam 20 tahun depan bidang prasarana dan sarana adalah sebagai berikut:

Tahun 2005-2010 Subbidang Sumberdaya Air:

1. Pengelolaan Sumberdaya air sudah tertata dengan baik yang ditunjang dengan penegakkan hukum dan mantapnya lembaga pengelola sumberdaya air;
2. Bertambahnya tanggul pengaman pantai untuk melindungi wilayah-wilayah rawan abrasi dan gelombang pasang di wilayah pulau Sangihe, Siau dan Tagu landang;
3. Berkurangnya wilayah rawan banjir dan tanah longsor;
4. Bertambahnya sarana prasarana air bersih di daerah-daerah krisis air bersih

Subbidang Transportasi:

1. Meningkatnya kaulitas jalan; yang saat ini merupakan jalan kerikil menjadi jalan aspal;
2. Rampungnya jalan lingkar pulau Sangihe yang diikuti dengan bertambahnya ruas jalan provinsi dan jalan nasional;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan, kenyamanan, keselamatan transportasi jalan angkutan umum dalam kota serta bertambahnya rambu-rambu lalu lintas sampai ke jalan-jalan kabupaten dan kota;

4. Bertambahnya jumlah armada angkutan penyeberangan perintis dari pihak pemerintah maupun pihak swasta untuk merangkai gugusan pulau-pulau di kabupaten Sangihe;
5. Adanya rintisan pembangunan dermaga fery di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau perbatasan;
6. Meningkatnya pelayanan kepelabuhanan dan menghapus seluruh pungutan-pungutan tidak resmi di pelabuhan pada tahun 2006;
7. Meningkatnya fasilitas pendukung di pelabuhan Tahuna, Ulu Siau dan Tagulandang;
8. Meningkatnya jasa transportasi laut pulau kecil dan pusat-pusat pemasaran; 9. Bertambahnya runway bandara Naha menjadi 1500 meter yang dibarengi dengan meningkatnya kualitas pelayanan.

Subbidang Kelistrikan dan sub bidang telekomunikasi :

1. Adanya rintisan pengembangan jaringan pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya di klaster Biaro, Tatoareng dan Pulau Perbatasan;
2. Terbangunnya jaringan telekomunikasi via satelit di desa-desa terpencil dan pulau-pulau kecil melalui Program *Universal Service Obligation* (USO).

Sub Bidang Perumahan dan Permukiman :

1. Meningkatnya kualitas rumah dan lingkungan komunitas perumahan yang sehat di Pulau-pulau Perbatasan
2. Penyiapan sarana dan prasarana sanitasi/MCK yang memadai dan memenuhi standar kesehatan.
3. Terbentuknya pola pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru yang berbasis swadaya masyarakat, serta peningkatan akses kredit mikro untuk pem bangunan dan perbaikan perumahan berbasis keswadayaan masyarakat.

Infrastruktur lain :

1. Berfungsinya Pelabuhan Perikanan Dagho yang ditunjang dengan peningkatan fasilitas pendukung kepelabuhanan.
2. Rintisan pembangunan pelabuhan TNI AL

Tahun 2010-2015. Subbidang Sumberdaya Air:

1. Bertambahnya tanggul pengaman pantai untuk melindungi wilayah-wilayah rawan abrasi dan gelombang pasang di pulau Biaro;
2. Tertatanya sistem pengairan di wilayah rawan yang banjir sehingga dapat memperkecil terjadinya bencana banjir dan tanah longsor; dan
3. Ketersediaan air bersih di wilayah pulau sudah terpenuhi
4. Terbukanya jalan ke pelosok desa-desa terpencil;
5. Rampungnya jalan lingkar pulau Siau dan Tagulandang;
6. Pelayanan armada perintis sudah menjangkau keseluruhan klaster dengan terbangunnya dermaga fery di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau perbatasan;
7. Adanya tambatan perahu di semua pulau-pulau kecil berpenghuni; dan 5. Terbuka jalur penerbangan antar provinsi (Indonesia Timur) di Bandara Naha.

Subbidang Kelistrikan dan sub bidang telekomunikasi :

1. Terbangunnya jaringan pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya di klaster Biaro, Tatoareng dan Pulau Perbatasan khususnya pada wilayah yang belum ada jaringan listrik;
2. Terbukanya jaringan internet di setiap ibukota kecamatan.

Sub Bidang Perumahan dan Permukiman :

1. Meningkatnya kualitas rumah dan lingkungan komunitas perumahan yang sehat di Pulau-pulau kecil
2. Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi/MCK yang memadai dan memenuhi standar kesehatan
3. Terbentuknya pola pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru yang berbasis swadaya masyarakat, serta peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan berbasis keswadayaan masyarakat.
4. Rintisan pembangunan rumah susun
5. Penyediaan rumah baru bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah.

Infrastruktur lain :

1. Pelabuhan Perikanan Dagho sudah dapat berperan sebagai pusat pemasaran hasil tangkapan ikan di klaster Pulau Perbatasan, Klaster Sangihe dan Klaster Tatoareng.
2. Terbangunnya pelabuhan TNI AL

Tahun 2015-2020

Subbidang Sumberdaya Air:

1. Bertambahnya tanggul pengaman pantai untuk melindungi wilayah-wilayah rawan abrasi dan gelombang pasang di pulau –pulau kecil; dan
2. Tertatanya sistem pengelolaan sumberdaya air.
3. Terjadi peningkatan mutu jalan ke pelosok desa-desa terpencil;
4. Rampungnya jalan lingkar pulau Siau dan Tagulandang diikuti dengan bertambahnya ruas jalan provinsi dan jalan nasional;
5. Adanya pelabuhan yang representatif di klaster Pulau Perbatasan dan Biaro; dan
6. Status Bandara Naha menjadi Bandara Kelas III

Sub Bidang Perumahan dan Permukiman :

1. Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi / MCK yang memadai dan memenuhi standar kesehatan
2. Terbangunnya rumah-rumah susun di wilayah padat penduduk
3. Peningkatan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara serta pengembangan tata keselamatan bangunan gedung.

Subbidang Kelistrikan dan sub bidang telekomunikasi :

1. Meningkatnya kapasitas daya listrik di semua wilayah;
2. Pelabuhan Perikanan Dagho sudah dapat berperan sebagai pusat pemasaran dan pengolahan hasil tangkapan ikan di seluruh Klaster

Tahun 2020-2025 Subbidang Sumberdaya Air:

1. Pengelolaan Sumberdaya air sudah tertata dengan baik yang ditunjang dengan penegakkan hukum dan mantapnya lembaga pengelola sumberdaya air;
2. Terbangunnya tanggul pengaman pantai di semua wilayah rawan abrasi dan gelombang laut;
3. Ketersediaan air bersih di wilayah pulau sudah terpenuhi; dan
4. Tertatanya sistem pengelolaan sumberdaya air sehingga sudah tidak ada wilayah yang rawan banjir.

Subbidang Transportasi:

1. Semua ruas jalan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah teraspal;
2. Rampungnya semua jalan lingkar di Pulau Sangihe, Siau dan Tagulandang dengan perubahan status menjadi Jalan Nasional;
3. Mantapnya pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan, kenyamanan, keselamatan transportasi jalan angkutan umum dalam kota serta bertambahnya rambu-rambu lalu lintas sampai ke jalan-jalan kabupaten dan kota;
4. Adanya dermaga fery di semua klaster sekaligus dengan jangkauan pelayaran kapal fery;
5. Mantapnya sistem pelayanan di semua pelabuhan yang didukung dengan lengkapnya fasilitas pendukung kepelabuhanan (di semua klaster);
6. Pelabuhan Tahuna menjadi pelabuhan ekspor;
7. Terbangunnya tambatan perahu di pulau-pulau kecil yang berpenghuni; dan 8. Bandara Naha sudah dapat melayani penerbangan domestik dan penerbangan internasional.

Sub Bidang Perumahan dan Permukiman :

1. Terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, layak, aman dengan dukungan fasilitas
2. Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi / MCK yang memadai dan memenuhi standar kesehatan
3. Peningkatan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara serta pengembangan tata keselamatan bangunan gedung.

Subbidang Kelistrikan dan sub bidang telekomunikasi:

1. Sistem jaringan telekomunikasi dan kelistrikan sudah menjangkau keseluruhan wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2.1.6. Pemerintahan

Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan (2005-2025) Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu melakukan serangkaian langkah kebijakan strategis guna menunjang pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, demokratis, aspiratif, transparan, akuntabel dan secara konsisten mempertahankan momentum manajemen empat karakteristik utama untuk penguatan integrasi negara akan ditempuh sejumlah kebijakan berikut:

Tahun 2005-2010

- 1) Pemantapan/Mempercepat Pemekaran Kabupaten Sitaro;
- 2) Mempersiapkan rencana Kota Tahuna menjadi Kota Madya dengan wilayah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tahuna dan Kendahe;
- 3) Memekarkan beberapa kecamatan di wilayah Tabukan, Tahuna, Manganitu, Tamako dan Kendahe;
- 4) Memekarkan desa/kelurahan di kecamatan-kecamatan yang memenuhi persyaratan;
- 5) Menata dan meletakkan dasar-dasar Tata Pemerintahan Daerah yang baik (*Good Local Governance*) menjadi Tata Pemerintahan yang bersih dan berwibawa mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
- 6) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Pemerintahan;
- 7) Menerapkan pelayanan publik yang bermutu dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan;
- 8) Menegakan supremasi hukum yang dimulai dari lingkungan Pemerintah Daerah (dan keluarganya) dan basis pendidikan serta orang per orang yang memadai dalam rangka penegakan supremasi hukum;
- 9) Melibatkan partisipasi masyarakat dalam rangka reformasi dan desentralisasi dengan memberikan ruang yang cukup dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan karena tanpa partisipasi masyarakat akan berakibat aparatur pemerintah tidak akan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat/sesuai dengan kebutuhan/aspirasi masyarakat;
- 10) Menerapkan proses demokratisasi dalam proses PILKADA Bupati/Wakil Bupati pertama secara langsung di Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun kabupaten baru hasil pemekaran;
- 11) Mendorong fungsi kemitraan pemerintah kabupaten;
- 12) Mengupayakan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan terutama di Klaster Sangihe, Siau dan Tagulandang;
- 13) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Klaster Sangihe, Siau dan Tagulandang;
- 14) Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Klaster Sangihe, Siau dan Tagulandang dalam penyelenggaraan pembangunan;
- 15) Memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan baik kewenangan mengenai tugas dan tanggung jawab maupun mengenai penggalan sumber dana dan pembiayaan pembangunan yang didukung oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 16) Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah termasuk mengoptimalkan peran pemerintah provinsi dan antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan negara tetangga dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- 17) Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme sehingga tersedia dana dan pembiayaan yang memadai bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di klaster Sangihe, Siau dan Tagulandang;
- 18) Mengupayakan revisi kebijakan terhadap berbagai peraturan yang tidak lagi relevan dengan

berbagai tuntutan perkembangan dan pembangunan; dan 19. Memperjuangkan pembentukan daerah otonom baru pada wilayah potensial.

Tahun 2010-2015

- 1) Melanjutkan penataan dan peletakan dasar-dasar Tata Pemerintahan yang baik;
- 2) Pemantapan/mempercepat Kota Tahuna menjadi Kota Madya;
- 3) Mempersiapkan pemekaran wilayah di kecamatan-kecamatan Tabukan menuju Kabupaten Tabukan;
- 4) Menata calon Ibukota Kabupaten Tabukan;
- 5) Mempersiapkan pemindahan calon ibukota kabupaten induk dengan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Manganitu, Tamako, Tatoareng setelah diadakan pemekaran terhadap ketiga kecamatan tersebut;
- 6) Mempersiapkan Kota Tamako menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Induk dengan wilayah Manganitu, Tamako, Manganitu Selatan dan Tatoareng;
- 7) Memekarkan Kabupaten Sitaro menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Siau dan kabupaten Tagulandang - Bitaro;
- 8) Meningkatkan pelayanan publik yang bermutu dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan;
- 9) Memantapkan penegakan supremasi hukum yang dimulai dari lingkungan Pemerintah Daerah (dan keluarganya) dan basis pendidikan serta orang perorang yang memadai dalam rangka penegakan supremasi hukum;
- 10) Melanjutkan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka reformasi dan desentralisasi dengan memberikan ruang yang cukup dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan karena tanpa partisipasi masyarakat akan berakibat aparatur pemerintah tidak akan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat/sesuai dengan kebutuhan/aspirasi masyarakat;
- 11) Melanjutkan upaya penerapan demokratisasi dalam proses PILKADA pada kabupaten induk dan wilayah yang baru dimekarkan;
- 12) Melanjutkan fungsi kemitraan pemerintah kabupaten;
- 13) Memantapkan upaya penanggulangan penyalahgunaan kewenangan di Klaster Sangihe, Siau dan Tagulandang dan menerapkan upaya serupa di Klaster Perbatasan, Tatoareng dan Biaro;
- 14) Memantapkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Klaster Sangihe, Siau dan Tagulandang dan menerapkan upaya yang sama di Klaster Perbatasan, Tatoareng dan Biaro;
- 15) Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Klaster Perbatasan, Tatoareng dan Biaro dalam penyelenggaraan pembangunan;
- 16) Melanjutkan upaya penetapan kewenangan antar tingkat pemerintahan baik kewenangan mengenai tugas dan tanggung jawab maupun mengenai penggalan sumber dana dan pembiayaan pembangunan yang didukung oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 17) Memperluas cakupan kerjasama dan kualitas kerjasama antar pemerintah daerah dan antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan negara tetangga;

- 18) Mengupayakan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional di Klaster Sangihe, Siau dan Tagulandang;
- 19) Meneruskan upaya peningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme sehingga tersedia dana dan pembiayaan yang memadai bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah;
- 20) Melanjutkan upaya revisi kebijakan terhadap berbagai peraturan yang tidak lagi relevan dengan berbagai tuntutan perkembangan dan pembangunan.

Tahun 2015-2020

1. Merealisasikan pemekaran Kota Tahuna dan Kecamatan Kendahe menjadi Kotamadya Tahuna Kendahe;
2. Mewujudkan Kabupaten Tamako dan Manganitu sebagai daerah otonom baru;
3. Memantapkan Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud menjadi satu wilayah Pemerintahan Provinsi;
4. Memantapkan implementasi Tata Pemerintahan yang baik;
5. Menuntaskan pelayanan publik yang bermutu dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan;
6. Menuntaskan upaya supremasi hukum yang dimulai dari lingkungan Pemerintah Daerah (dan keluarganya) dan basis pendidikan serta orang per orang yang memadai dalam rangka penegakan supremasi hukum;
7. Menyempurnakan partisipasi masyarakat dalam rangka reformasi dan desentralisasi dengan memberikan ruang yang cukup dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan karena tanpa partisipasi masyarakat akan berakibat aparatur pemerintah tidak akan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat / sesuai dengan kebutuhan / aspirasi masyarakat;
8. Melanjutkan upaya penerapan demokratisasi dalam proses PILKADA pada kabupaten induk dan wilayah yang baru dimekarkan;
9. Memantapkan fungsi kemitraan pemerintah kabupaten;
10. Memantapkan proses demokratisasi pada proses PILKADA periode ini;
11. Menuntaskan upaya penyalahgunaan kewenangan di seluruh klaster;
12. Menuntaskan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan di semua klaster;
13. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di seluruh klaster dalam penyelenggaraan pembangunan;
14. Menuntaskan upaya pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan baik kewenangan mengenai tugas dan tanggung jawab maupun mengenai penggalan sumber dana dan pembiayaan pembangunan yang didukung oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Memantapkan upaya dan cakupan serta kualitas kerjasama antar pemerintah daerah dan antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan negara tetangga;
16. Memantapkan kualitas aparatur pemerintah daerah di semua klaster;

17. Menyempurnakan upaya peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme sehingga tersedia dana dan pembiayaan yang memadai bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah;
18. Menuntaskan revisi kebijakan terhadap berbagai peraturan yang tidak lagi relevan dengan berbagai tuntutan perkembangan dan Pembangunan.

Tahun 2020-2025

1. Tercapainya pelayanan publik yang bermutu dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan;
2. Terlaksananya supremasi hukum yang dimulai dari lingkungan Pemerintah Daerah (dan keluarganya) dan basis pendidikan serta orang per orang yang memadai dalam rangka penegakan supremasi hukum;
3. Tercapainya partisipasi masyarakat dalam rangka reformasi dan desentralisasi dengan memberikan ruang yang cukup dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan karena tanpa partisipasi masyarakat akan berakibat aparatur pemerintah tidak akan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat/sesuai dengan kebutuhan/aspirasi masyarakat;
4. Memantapkan upaya penerapan demokratisasi dalam proses PILKADA pada kabupaten induk dan wilayah yang baru dimekarkan;
5. Memantapkan fungsi kemitraan pemerintah kabupaten;
6. Menyempurnakan proses demokratisasi pada proses PILKADA periode ini;
7. Menuntaskan upaya peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di seluruh klaster;
8. Melanjutkan upaya pemantapan dan cakupan serta kualitas kerjasama antar pemerintah daerah dan antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan negara tetangga;
9. Memantapkan kerjasama antar daerah dan negara tetangga di berbagai bidang pembangunan;
10. Melanjutkan upaya pemantapan kualitas aparatur pemerintah di semua klaster; 11. Menuntaskan upaya peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme sehingga tersedia dana dan pembiayaan yang memadai bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah;
11. Mengkaji dan menata semua daerah otonom yang telah terbentuk sehingga mencapai tujuan utama yang dicita-citakan dalam pemekaran wilayah, kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
12. Mengantisipasi perubahan-perubahan mendasar dalam rangka penyesuaian seluruh perangkat dokumen perencanaan sebagai konsekuensi peningkatan status administratif pemerintahan.

Dengan kebijakan yang akan diterapkan dalam ruas lima tahunan di atas, kondisi umum pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan akan semakin efektif dengan dilakukannya pemekaran pada sejumlah wilayah potensial menjadi kelurahan, kecamatan, kodya dan kabupaten baru;
- (2) Terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat;

- (3) Kerjasama antar pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan negara tetangga dalam berbagai bidang pembangunan sudah mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (4) Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundangundangan pusat dan daerah,
- (5) Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
- (6) Meningkatnya kapasitas pengelolaan SDM aparatur yang profesional dan kompeten,
- (7) Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel dan profesional;
- (8) Terlaksananya konsep pola pembangunan kepulauan dan pembangunan berorientasi *outward looking*.

2.1.8. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bertolak dari proyeksi peluang, ancaman dan permasalahan-permasalahan di atas maka tahapan-tahapan yang akan ditempuh untuk meningkatkan kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sebagai berikut: (i) Meningkatnya ketersediaan, hasil guna dan daya guna (SDM, sarana, prasarana dan kelembagaan) Iptek dan (ii) Terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan pengetahuan lokal. Sejumlah kebijakan berikut akan diterapkan untuk pencapaian tujuan-tujuan di atas dalam 20 tahun ke depan :

Tahun 2005-2010

1. Menyediakan prasarana dan sarana Iptek terutama perguruan tinggi negeri di Klaster Sangihe dan akademi di Klaster Siau dan Tagulandang;
2. Menetapkan prioritas penelitian dan pengembangan Iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha;
3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumber daya dan jaringan Iptek di daerah;
4. Menanamkan dan menumbuhkembangkan budaya Iptek untuk meningkatkan daya saing daerah;
5. Menciptakan iklim inovasi dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat;
6. Mengembangkan kemitraan dengan PTS/PTN yang sudah mapan, dunia industri dan pihak-pihak lain terkait dengan pengembangan Iptek lebih lanjut di dalam maupun luar negeri; dan
7. Memanfaatkan teknologi informasi untuk pengembangan dan pembangunan daerah.

Tahun 2010-2015

1. Melanjutkan upaya penyediaan prasarana dan sarana Iptek terutama perguruan tinggi negeri dan Litbang di Klaster Sangihe dan akademi di Klaster Siau dan Tagu landang;
2. Melakukan pengkajian prioritas penelitian dan pengembangan Iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha;
3. Melanjutkan upaya peningkatkan kapasitas dan kapabilitas Iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumber daya dan jaringan Iptek di daerah;

4. Melanjutkan upaya menumbuhkembangkan budaya Iptek untuk meningkatkan daya saing daerah;
5. Membudayakan iklim inovasi dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat;
6. Memantapkan kemitraan dengan PTS/PTN yang sudah mapan, dunia industri dan pihak-pihak lain terkait dengan pengembangan Iptek lebih lanjut di dalam maupun luar negeri;
7. Melanjutkan upaya pengkajian secara intensif terhadap sumber daya unggulan daerah; dan
8. Memantapkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan dan pembangunan daerah.

Tahun 2015-2020

1. Memantapkan prasarana dan sarana Iptek terutama perguruan tinggi negeri dan Litbang di Klaster Sangihe;
2. Melanjutkan pengkajian prioritas penelitian dan pengembangan Iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha;
3. Memantapkan kapasitas dan kapabilitas Iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumber daya dan jaringan iptek di daerah;
4. Memantapkan upaya menumbuhkembangkan budaya Iptek untuk meningkatkan daya saing daerah;
5. Memantapkan budaya iklim inovasi dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat untuk mendorong perkuatan industri;
6. Memantapkan kemitraan dengan PTS/PTN yang sudah mapan, dunia industri dan pihak-pihak lain terkait dengan pengembangan Iptek lebih lanjut di dalam maupun luar negeri;
7. Melanjutkan upaya pengkajian secara intensif terhadap sumber daya unggulan daerah termasuk pengkajian terhadap pengembangan nilai tambah; dan
8. Memantapkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan dan pembangunan daerah dan menerapkan sistim MSTQ.

Tahun 2020-2025

1. Menuntaskan prasarana dan sarana Iptek yang belum rampung terutama perguruan tinggi negeri dan Litbang di Klaster Sangihe;
2. Mengkaji, menata prioritas penelitian dan serta menerapkan hasil penelitian yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha;
3. Memantapkan kemitraan dengan PTS/PTN yang sudah mapan, dunia industri dan pihak-pihak lain terkait dengan pengembangan Iptek lebih lanjut di dalam maupun luar negeri;
4. Memantapkan dan mengembangkan upaya pengkajian secara intensif terhadap sumber daya unggulan daerah termasuk pengkajian terhadap pengembangan nilai tambah produk;
5. Memantapkan upaya pengkajian secara intensif terhadap sumber daya unggulan daerah termasuk pengkajian terhadap pengembangan nilai tambah; dan
6. Memantapkan teknologi informasi untuk pengembangan dan pembangunan daerah dan penerapan sistim MSTQ.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh selama 20 tahun di atas, maka kondisi Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2025 diperkirakan sebagai berikut :

Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

1. Sistem mitigasi bencana sudah berfungsi maksimal yang didukung oleh penguasaan teknologi terkait dengan sistem peringatan dini, ketersediaan sarana pendukung termasuk sarana untuk deteksi bencana terutama di pulau-pulau seperti Sangihe Besar, Siau, Tagulandang dan Tatoareng serta badan yang telah mapan menangani masalah bencana;
2. Mantapnya pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ditandai dengan (a) tingginya kesadaran semua pihak termasuk masyarakat dalam mengendalikan dampak pembangunan terhadap lingkungan, (b) terciptanya harmonisasi hukum di bidang lingkungan dan konsistennya penegakan hukum, (c) mantapnya penyebaran data dan informasi wilayahwilayah rawan bencana dan (d) diterapkannya upaya konservasi secara profesional dan konsisten di wilayah daratan maupun laut Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Meningkatnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) disertai dengan pengendalian dan pemanfaatan terpadu antar sektor;
4. Meningkatnya luas kawasan konservasi laut;
5. Terintegrasinya pembangunan laut, pesisir dan daratan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah; dan
6. Mantapnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memelihara lingkungan hidup.

Demografi

1. Administrasi kependudukan telah tertata baik termasuk kualitas dokumen, data dan informasi penduduk dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan penduduk berkelanjutan;
2. Telah terwujud penduduk yang sehat dan keluarga kecil berkualitas di seluruh klaster;
3. Persebaran dan mobilitas penduduk telah tertata secara seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Kualitas hidup masyarakat membaik yang ditandai dengan peningkatan kualitas kesehatan, gizi dan penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan.

Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Telah tercapai tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dengan tingkat pemerataan yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 %;
2. Telah terbangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis sumber daya lokal dengan perikanan, pertanian, pariwisata dan pertambangan sebagai sektor pendukung untuk pengembangan sektor industri yang akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan penciptaan lapangan/kesempatan kerja yang cukup tinggi;
3. Telah tercipta efisiensi, modernisasi dan nilai tambah kegiatan sektor primer terutama pertanian dalam arti luas (perikanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan kehutanan) guna menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing di pasaran lokal maupun internasional;
4. Kemandirian pangan daerah terjaga karena berkembangnya kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah, mutu maupun gizi;
5. Investasi daerah berkembang yang ditandai dengan berperannya sektor penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), swasta dan masyarakat dengan *incremental*

capital output ratio (ICOR) berada pada kisaran nilai 3–4;

6. Sektor industri sudah mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah berdaya saing yang dibangun dalam satu sistem mata rantai industri (tahap produksi- produksi antara-tahap akhir produksi-tahap konsumsi) dalam keterkaitan sistem wilayah pengembangan ekonomi dengan dukungan infrastruktur teknologi, mutu, peningkatan kemampuan tenaga kerja dan infrastruktur fisik;
7. Pola pemanfaatan sumber daya perikanan telah berubah dari pola pemanfaatan bersifat tradisional menjadi pemanfaatan *modern*. Untuk sektor perikanan tangkap, pemanfaatan telah mencapai daerah ZEEI dan didukung oleh industri pengolahan seperti pengalengan dan tepung ikan, sedangkan perikanan budidaya diharapkan telah mampu memberikan kontribusi signifikan untuk mendukung produksi sektor perikanan dan kelautan;
8. Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan secara berkelanjutan, berkeadilan dan berkeselimbangan untuk memperoleh nilai tambah yang optimal bagi kepentingan daerah;
9. Stabilitasnya harga di tingkat produsen, inflasi berada di bawah dua digit angka, rendahnya tingkat suku bunga perbankan;
10. Adanya keberpihakan lembaga-lembaga keuangan yang tercermin dalam peningkatan peran dan fungsi pelayanan lembaga-lembaga keuangan terhadap pelaku ekonomi kerakyatan (UKM dan Koperasi);
11. Produktivitas tenaga kerja yang tinggi sebagai dampak terbukanya lapangan/kesempatan kerja, peningkatan jiwa usaha/wirausaha yang diindikasikan dengan dominannya serapan penggunaan kredit modal kerja oleh masyarakat dibandingkan kredit konsumtif;
12. Pembangunan ekonomi telah memungkinkan daerah membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah atau berkurangnya tingkat ketergantungan daerah terhadap sumbangan dari luar daerah.

Sarana dan Prasarana

- 1) Transportasi darat sudah menjangkau sentra-sentra produksi di seluruh wilayah kecamatan, desa/kelurahan terutama di Pulau Sangihe, Siau, Tagulandang dan Biaro;
- 2) Semua jalan lingkar Pulau Sangihe, Siau, Tagulandang dan Biaro sudah menjadi Jalan Nasional dan ruas-ruas jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah kecamatan di pulau-pulau besar (Sangihe, Siau dan Tagulandang) sudah menjadi Jalan Provinsi sedangkan jalan-jalan kecamatan dan desa/kelurahan menjadi jalan kabupaten untuk mendukung aktifitas pemerintahan dan ekonomi daerah;
- 3) Transportasi laut telah menjadi penghubung yang efektif/efisien antar wilayah nasional, provinsi, kabupaten serta antar klaster di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendukung aktifitas ekonomi dan meningkatnya kelancaran, keamanan dan kenyamanan pelayaran;
- 4) Pulau-pulau di setiap klaster mampu meng-akses transportasi laut secara leluasa;
- 5) Transportasi udara sudah menjadi sarana transportasi yang handal untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan ekonomi serta mendukung pendekatan *inward looking* dan *outward looking*.

Sosial Budaya dan Politik

1. Peran BKSUA sudah mantap dalam menjamin kerukunan hidup antar umat beragama; dan
2. Mantapnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan beragama sehingga terwujud hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bermoral, beretika dan berpengamalan sepiritual

yang dicirikan antara lain oleh mantapnya penerapan pesan-pesan moral agama dalam kehidupan sehari-hari yang didukung oleh pembinaan agama di tingkat keluarga dan sekolah;

3. Tersedianya berbagai sarana kesehatan seperti puskesmas di semua desa, rumah sakit di semua klaster dengan status yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap klaster;
4. Tersedianya tenaga kesehatan (dokter, tenaga paramedis lainnya) dengan kualitas dan kuantitas yang memadai pada semua sarana kesehatan tersedia;
5. Meningkatnya ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau terutama bagi masyarakat miskin;
6. Mantapnya layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan dan anak;
7. Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya daerah yang dalam diwujudkan dalam setiap kebijakan pembangunan;
8. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya;
9. Semakin kokohnya NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
10. Tuntasnya berbagai program wajib belajar (Pendidikan Dasar Sembilan dan Dua Belas Tahun) di semua klaster;
11. Meningkat dan meratanya jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di semua klaster;
12. Terciptanya perluasan, pemerataan dan mutu pendidikan melalui jalur formal dan non-formal untuk umum maupun kejuruan;
13. Meningkatnya proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang yang lebih tinggi;
14. Tersedianya tenaga kerja berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja;
15. Tercapainya tingkat pendidikan yang akan mempertinggi kualitas hidup perempuan dan anak;
16. Terciptanya iklim politik yang kondusif yang dapat mendukung optimalisasi pembangunan di semua klaster;
17. Terselenggaranya semua proses PILKADA secara tertib dan aman di kabupaten induk maupun di semua kabupaten/kota hasil pemekaran;
18. Diterapkannya hukum untuk melindungi setiap individu dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga;
19. Mantapnya upaya penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk pemenuhan komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Iptek telah mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah serta meningkatkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;

1. Iptek akan menjadi penopang utama pengembangan industri berbasis sumber daya lokal;

2. Iptek dapat berperan maksimal dalam menopang pengembangan daya saing produk dan jasa dari sektor-sektor unggulan daerah, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menekan dampak bencana alam serta meningkatkan jumlah maupun kualitas SDM daerah yang terlatih dengan baik di berbagai bidang pembangunan; dan
3. Penguasaan Iptek akan mampu meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan, rumah tangga dan agroindustri.